



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (BAPPEDA)



LAPORAN **TAHUNAN SDGs**
TAHUN 2020

ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 -2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi NTB, berdasarkan data capaian tahun 2019 adalah jumlah indikator yang tercapai 109 indikator, yang akan tercapai sebanyak 13 indikator dan sisanya adalah indikator belum tercapai yang perlu perhatian khusus terutama intervensi program/kegiatan untuk mendukung pencapaian target pada masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tinjauan status pencapaian 17 tujuan TPB/SDGs bisa dilihat dari keadaan dan kecenderungan (trend) dimana angka kemiskinan dan rawan pangan mengalami penurunan, target harapan hidup dan IPM meningkat, rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air layak minum, peningkatan rasio elektrifikasi listrik, jumlah angkatan kerja di NTB terus mengalami peningkatan, pertumbuhan dan kontribusi PDRB industri pengolahan yang lebih tinggi, Ketimpangan ekonomi atau indeks gini mengalami peningkatan, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, nelayan terlindungi atau terfasilitasi dengan asuransi mengalami tren peningkatan, kualitas tutupan lahan NTB lebih baik dan Indeks Kapasitas Fiskal daerah meningkat.

Tantangan yang cukup dinamis yang sedang dihadapi pemerintah provinsi NTB adalah proses rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana gempa bumi. Disamping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan strategi dan arah kebijakan pencapaian target indikator kinerja pemerintah provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2023 yang merupakan bagian internalisasi dan harmonisasi RAD tentang percepatan dan pencapaian TPB/SDGs Provinsi NTB tahun 2018- 2023. Upaya percepatan dan pencapaian target indikator melalui intervensi program/kegiatan yang di fokuskan untuk mendukung program prioritas dan program unggulan. Keberhasilan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan komitmen bersama dengan memastikan sinergitas program/kegiatan dapat berjalan secara optimal.

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 25 September 2015, Negara-negara anggota PBB merangkai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium, atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berlangsung dari tahun 2000 sampai 2015. TPB sendiri menyertakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tanggal waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 - 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan SDGs Provinsi NTB tahun 2020 yang disusun menggambarkan progres capaian 17 tujuan SDGs yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

Dengan adanya TPB yang dicanangkan oleh PBB diharapkan dapat mendorong semua pemerintah daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat untuk terlibat dan mensukseskannya. Mengingat pada pencanangan MGDs sebelumnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup sukses dalam upaya pencapaian tujuan MDGs. Hal ini terlihat dengan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB selama lima tahun berturut - turut mendapatkan MDGs Award dari pemerintah pusat. Prestasi ini harus memacu NTB untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaiannya pada TPB/SDGs saat ini dan dimasa mendatang. Adapun langkah startegis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB guna memastikan terlaksanakanya TPB/SDGs ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 tentang rencana aksi daerah percepatan pencapaian TPB/SDGs tahun 2019 – 2023 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun substansi muatan yang diintegrasikan dalam dokumen dimaksud diantaranya, sasaran, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.

Guna memastikan terwujudnya capaian tujuan TPB/SDGs, maka diharapkan peran masing-masing stakeholder yang terkait sesuai tupoksi dan kewenangannya agar mengoptimalkan implimentasi kegiatan-kegiatan strategisnya dengan menggunakan instrumen analisa dan data yang terukur sesuai standar akademik. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelaraskan percepatan pencapaian TPB/SDGs maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB telah memfasilitasi terbentuknya riset center SDGs yang beranggotakan para pakar dari perwakilan Perguruan Tinggi yang ada di NTB.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan laporan TPB/SDGs tahun 2020 yang menggambarkan peran berbagai stakeholder dalam berkontribusi membangun daerah NTB dapat bermanfaat dan juga menjadi referensi pertimbangan perencanaan pembangunan daerah NTB di masa mendatang. Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini baik dari sisi konten, materi maupun tata naskah masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan penyusunan laporan selanjutnya sangat kami harapkan.

Mataram, Desember 2020
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

DAFTAR ISI

ABSTRAK	_____	i
KATA PENGANTAR	_____	ii
DAFTAR ISI	_____	iv
BAB I	PENDAHULUAN _____	1
	Berisi : Latar belakang	
BAB II	STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLEDEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) DI PROVINSI NTB _____	5
	Berisi : Tujuan 1.Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2.Tanpa Kelaparan, Tujuan 3. Kehidupan sehat dan Sejahtera, Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas, Tujuan 5. Kesetaraan Gender, Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan, Tujuan 11. Kota dan Pemukiman, Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14. Ekosistem Lautan, Tujuan 15.Ekosistem Daratan, Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.	
BAB III	TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) _____	48
	Berisi : Keadaan dan Kecendrungan (Tren), Tantangan dan Pembelajaran, Kebijakan dan strategi, dan Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs dari 17 Tujuan TPB SDGs	
BAB IV	PENUTUP _____	90
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan MDGs yang tidak tercapai. TPB/SDGs dalam pencapaiannya mengutamakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah : Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesenjangan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ditingkat Nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indicator yang terukur serta sumber pembiayaanya

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, adalah: “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang” yang akan diwujudkan melalui 6 misi, yaitu : 1) NTB Tangguh dan mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah 2) NTB Bersih dan melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi 3) NTB Sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah 4) NTB Asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan 5) NTB Sejahtera dan mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi 6) NTB Aman dan berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari visi dan misi ini, terlihat jelas keselarasan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023.

Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD 2019-2023, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk

mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati.

Sinergi antara RPJMN 2020-2024 RPJMD dan TPB/SDGs ditunjukkan pada keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa upaya penting yang dilakukan sebagai komitmen pemerintah Provinsi NTB dalam percepatan pencapaian SDGs di Tahun 2030 adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, yang dicirikan salah satunya dengan meningkatnya proporsi belanja langsung dan memprioritaskan target-target SDGs yang memiliki daya ungkit untuk mengintegrasikan pencapaian target lainnya.

Pemerintah NTB juga membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai kesempatan bagi pemangku kepentingan di NTB baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Filantropi maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDG's, serta memberi masukan bagi penyusun kebijakan dalam rangka SDG's di daerah.

Point penting dalam SDGs yang utama adalah pembangunan berbasis hak asasi diarahkan agar dapat memfasilitasi generasi sekarang

sekaligus generasi yang akan datang. Konsep pembangunan adalah mengurangi sampah dari hasil pembangunan yang tidak efisien, maka SDGs mendorong cara-cara pencapaian dengan beberapa nilai, yaitu diantara kesetaraan, inklusif dan partisipatif dengan strategi pembangunan terintegrasi yang diperankan oleh berbagai pihak.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak

swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan laporan tahunan TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga non pemerintah terutama terkait data capaian indikator, program/kegiatan yang mendukung capaian serta pembelajaran dari praktik baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun nonpemerintah

BAB II

STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) DI PROVINSI NTB



Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

“Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun”

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun merupakan tujuan pertama dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan perlindungan sosial, meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, dan membangun ketahanan terhadap dampak bencana alam dan non alam yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada sumber daya dan mata pencaharian masyarakat.

Pembahasan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan difokuskan pada capaian tingkat kemiskinan, serta cakupan perlindungan sosial dan pelayanan dasar, dengan cakupan indikator TPB/SDGs seperti : (1) Tingkat kemiskinan ekstrim atau persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional pada *Purchasing Power Parity (PPP)* dengan batas US\$ 1.9 per kapita/hari; (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; (3) Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan; (4) Indeks Resiko Bencana (IRB); dan (5) Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB). Capaian Indikator sebagai berikut:

- Garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Garis kemiskinan pada Maret 2020 mengalami kenaikan dibandingkan garis kemiskinan pada September 2019 yaitu dari Rp. 392.184,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp. 404.941,- per kapita per bulan pada Maret 2020. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2020 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,71 persen. Garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 302.545,- per kapita per bulan sedangkan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 102.397,- per kapitan per bulan. Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan periode Maret 2020 sebesar 13,97 persen, lebih rendah 0.59 point dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019 yaitu 14.56 persen.
- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari jumlah penduduk miskin pada September 2019 yang tercatat sebesar 13.88 persen terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 yang tercatat 13,97 persen. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan diantaranya penguatan peran badan usaha milik desa

(bumdes), pembangunan jamban keluarga, perbaikan rumah tinggal layak huni (RTLH), kelompok usaha bersama (kUBE), kawasan rumah pangan lestari (KRPL), bank sampah, penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan, yang diarahkan pada desa-desa basis kemiskinan.

- Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan / PSJSN-K capaian tahun 2019 sebesar 7,86 persen, meningkat 0,07 point pada tahun 2020 dengan capaian 7,93 persen. Peningkatan persentase kepesertaan jaminan social bidang ketenagakerjaan ini salah satunya disebabkan oleh cukup tingginya pemahaman perusahaan dan pekerja akan benefit yang akan diperoleh jika menjadi peserta bantuan social ketenagakerjaan. Pemahaman tersebut melahirkan kesadaran untuk menjadi peserta jaminan social ketenagakerjaan. Selain itu adanya regulasi pemerintah yang mewajibkan agar perusahaan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan social ketenagakerjaan.
- Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR tahun 2020 mencapai 8,90 persen, menurun 0,70 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (9,6 persen). Capaian 8,90 persen diperoleh dari penanganan disabilitas melalui bantuan aksesibilitas dan asistensi social penyandang disabilitas (ASPD) tahun 2020.
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat pada tahun 2020 sebanyak 351.136 orang, meningkat 7.773 orang penerima bantuan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 343.363 orang. Meningkatnya jumlah penerima bantuan disebabkan dampak pandemic covid-19 sehingga sasaran penerima bantuan menjadi bertambah, namun demikian belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 396,221 orang. Dalam pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga miskin, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Social (DTKS) memegang peranan yang

sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan sasaran penerima manfaat bantuan tunai bersyarat.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB Bulan Agustus 2020 tercatat 4,22 persen. Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 untuk laki-laki 4,97 persen, lebih tinggi daripada tingkat pengangguran terbuka perempuan yaitu 3,22 persen. Jika dibandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Sementara dilihat dari tingkat Pendidikan, TPT didominasi oleh lulusan SMK yaitu 9,71 persen diikuti oleh SMA 5,6 persen dan universitas 5,43 persen. Dibandingkan dengan tahun 2019, TPT Agustus 2020 meningkat 0,94 point. Salah satu penyebabnya adalah dampak covid-19 pada ketenagakerjaan. Selain pengangguran meningkat, bukan Angkatan kerja, sementara tidak bekerja penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga meningkat, serta beberapa pekerjaan hilang akibat pandemic covid-19.
- Indeks Resiko Bencana (IRB), Penghitungan IRB dalam hal ini akan menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Perhitungan IRB juga menjadi bagian penting dari skenario dan proyeksi perencanaan pembangunan yang lebih baik karena NTB termasuk dalam daerah yang rentan bencana maka perhitungan IRB juga harus lebih akurat dan sistimatis, pada tahun 2019 capaian indikator IRB sebesar 72,18 resiko yang artinya NTB berada pada resiko tinggi bencana.
- Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) sudah lebih baik dilaksanakan dimana capaian dari target 1 dokumen dengan realisasi 2 dokumen tahun 2019.



Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

“Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan”

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, gizi yang baik serta pertanian yang berkelanjutan pada tahun 2030 merupakan tujuan kedua dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Masyarakat membutuhkan akses pangan yang lebih baik serta promosi pertanian berkelanjutan yang lebih luas. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani skala kecil menjadi prioritas untuk memastikan setiap orang memperoleh konsumsi pangan yang cukup dan berkualitas untuk menjalani hidup sehat.

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan ini akan membahas capaian perbaikan gizi dan penyediaan pangan, dengan cakupan indikator SDGs sebagai berikut: (1) Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita /PKG AB (5); (2) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita; (3) Prevalensi malnutrisi (*wasting*) anak pada usia kurang dari 5 tahun, (4) Prevalensi anemia pada ibu hamil tahun 2019 dan (5) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Adapun status capaian SDGs NTB Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita /PKG AB (5) sebesar 13,54 persen tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 1,61 persen pada tahun 2020 menjadi 15,15 persen, hal ini menunjukkan bahwa balita di NTB semakin banyak yang mengalami kekurangan gizi. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemic covid-19 yang berdampak pada penghasilan yang menurun sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli makanan yang berkualitas untuk keluarganya termasuk juga pelayanan gizi dan Kesehatan yang

terhambat di posyandu, juga deteksi dini terhambat. *Underweight* adalah indikator kekurangan gizi anak yang tidak membedakan antara kekurangan gizi jangka pendek *wasting* dan kronis *stunting*. Jika dibandingkan dengan prevalensi balita *underweight* nasional tahun 2019 yang berada di angka 16,29 persen, jauh dibawah capaian NTB 2019 yaitu 13,54 persen. Meskipun capaian nasional tahun 2020 belum dirilis, namun dengan melihat capaian tahun 2019, patut optimis bahwa prevalensi *underweight* NTB 2020 juga akan berada pada posisi diatas capaian nasional. Menurut UNICEF, *underweight* disebabkan oleh factor langsung seperti pengaruh penyakit infeksi dan tidak cukupnya asupan gizi secara kuantitas dan kualitas. Sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh jangkauan dan kualitas pelayanan Kesehatan, pola asuh anak yang kurang memadai, kurang baiknya kondisi sanitasi lingkungan serta rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun capaian prevalensi *underweight* NTB berada diatas angka nasional, namun upaya untuk lebih menurunkan prevalensi *underweight* oleh pemprov NTB tetap dilakukan. Strategi untuk mengatasi permasalahan gizi di NTB antara lain: peningkatan SDM, peningkatan kualitas Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), peningkatan edukasi gizi dan penguatan intervensi gizi di puskesmas dan posyandu. Keempat strategi tersebut dibarengi dengan program promosi konseling PMBA, promosi dan konseling menyusui serta pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak, selain itu pemberian suplemen tablet tambah darah (TTD) ibu hamil dan remaja serta pemberian vitamin A dan makanan tambahan lainnya bagi ibu hamil dan balita. Pemprov NTB juga focus melakukan penguatan gizi dengan pendekatan siklus hidup 1000 hari pertama kehidupan dan remaja.

- *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan

yang tidak sesuai kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. *Stunting* memiliki efek jangka panjang, berupa berkurangnya kemampuan kognitif dan perkembangan fisik, serta mengurangi kapasitas kesehatan. Kementerian kesehatan membuat riset dengan model terbaru yaitu Pemantauan Status Gizi (PSG) pada tahun 2014. PSG merupakan studi potong lintang dengan sample rumah tangga yang mempunyai balita (0-59 bulan) di Indonesia. Jika dibandingkan Riskesdas, hasil riset PSG dapat membuat angka *stunting* di Indonesia menjadi turun. Beberapa faktor yang mempengaruhi *stunting* seperti penghasilan keluarga, tingkat pendidikan ayah, pendidikan ibu, pengetahuan gizi ibu, dan jumlah anggota keluarga. Prevalensi anak balita yang menderita pendek (*stunting*) di NTB tahun 2019 sebesar 19,02 persen dan meningkat 4,25 point pada tahun 2020 menjadi 23,27 persen. Hal ini menunjukkan masalah *stunting* di NTB yang diakibatkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk itu penanganan *stunting* tidak cukup hanya melalui intervensi gizi spesifik saja, namun perlu didorong melalui intervensi gizi sensitive seperti program keluarga harapan, bantuan pangan, asuransi kesehatan nasional, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), program PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI), program sanitasi berbasis masyarakat.

- Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita tahun 2020 sebesar 6,38 persen, kondisinya membaik dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,86

persen. Upaya yang dilakukan pemprov NTB untuk menekan prevalensi malnutrisi ini adalah dengan menemukan akar masalahnya terlebih dahulu. Sebagian besar penyebab malnutrisi pada balita adalah karena pola asuh, banyak balita yang belum mendapatkan ASI eksklusif dan buruknya sarana sanitasi.

- Prevalensi anemia pada ibu hamil tahun 2020 sebesar 6,1 persen, kondisi ini lebih baik daripada kondisi tahun 2019 yaitu 9,1 persen. Kondisi anemia pada ibu hamil harus dideteksi sedini mungkin dan diberikan penatalaksanaan yang tepat. Perhitungan prevalensi anemia pada ibu hamil bermanfaat untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang berisiko dan memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat untuk mencegah ibu melahirkan bayi dengan anemia defisiensi besi yang akan menghambat pertumbuhan sel-sel otak dan sel tubuh lainnya yang dapat bermanifestasi dalam bentuk stunting maupun wasting. Ibu hamil dengan pengetahuan gizi baik diharapkan dapat memilih asupan makanan yang bernilai gizi baik dan seimbang bagi dirinya sendiri beserta janin dan keluarga, dengan pengetahuan gizi yang cukup dapat membantu seseorang belajar bagaimana menyimpan, mengolah serta menggunakan bahan makanan yang berkualitas untuk dikonsumsi menurut kebutuhannya. Untuk itu, upaya untuk lebih memberikan pemahaman terkait gizi serta bagaimana mengolah pangan yang baik dan benar menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemprov untuk menekan prevalensi anemia pada ibu hamil yaitu melalui program perbaikan gizi masyarakat.
- ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematkan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2018 yaitu sebesar 68,74 persen, posisinya jauh diatas jika dibandingkan

dengan persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif tahun 2018 di NTB yaitu sebesar 50 persen. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif tahun 2020 sebesar 67,1 persen, turun 18,68 point dibandingkan tahun 2019 sebesar 85,78 persen.. Untuk itu perlu terus disosialisasikan dan diberikan penyadaran pada ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya.



Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

“Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”

Upaya yang dilakukan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia adalah melalui beberapa target di antaranya :

TARGET	DESKRIPSI
Target 3.1	(1) Angka Kematian Ibu (AKI); (2) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%). (3) Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Target 3.2	(3) Angka Kematian Balita (AKBa); (4) Angka Kematian Neonatal (AKN); (5) Angka Kematian Bayi (AKB); (6) Persentase kabupaten/kota mencapai 80% imunisasi dasar.
Target 3.3	(7) Angka infeksi Baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV; (8) Insiden TB per 100.000 penduduk; (9) Kejadian malaria per 1.000 orang; (10) Jumlah kabupaten/kota eliminasi malaria; (11) Persentase kabupaten/kota deteksi dini Hepatitis B; (12) Jumlah orang memerlukan intervensi penyakit kusta; (13) Jumlah provinsi eliminasi kusta;

	(14) Jumlah kabupaten/kota eliminasi filariasis.
Target 3.4	(15) Persentase merokok penduduk umur ≤ 18 tahun; (16) Prevalensi tekanan darah tinggi; (17) Prevalensi obesitas penduduk umur ≥ 18 tahun; (18) Jumlah kabupaten/kota dengan puskesmas menyelenggarakan kesehatan jiwa (19) Angka kematian akibat bunuh diri;
Target 3.5	(20) Jumlah penyalahguna narkotika dan alkohol yang mengakses layanan rehabilitasi medis; (21) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi; (22) Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapat rehabilitasi social; (23) Jumlah Lembaga rehabilitasi sosial penyalahguna NAPZA yang dibantu; (24) Prevalensi penyalahgunaan narkotika;
Target 3.6	(26) Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.
Target 3.7	(27) Proporsi PUS menggunakan kontrasepsi modern; (28) Prevalensi CPR semua cara; (29) Angka penggunaan MKJP modern; (30) Tingkat kelahiran pada remaja (ASFR); (31) Angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR).
Target 3.8	(32) Unmet need pelayanan kesehatan; (33) Jumlah penduduk tercakup asuransi kesehatan per 1000 penduduk; (34) Cakupan JKN. (35) Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun; (36) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas; (37) Kepadatan dan distribusi tenaga medis; (38) Kepadatan dan distribusi tenaga psikologis klinis; (39) Kepadatan dan distribusi tenaga keperawatan; (40) Kepadatan dan distribusi tenaga kebidanan; (41) Kepadatan dan distribusi tenaga kefarmasian; (42) Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat; (43) Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan; (44) Kepadatan dan distribusi tenaga Gizi; (45) Kepadatan dan distribusi tenaga Keterampilan Fisik; (46) Kepadatan dan distribusi tenaga Keteknisan Medis; (47) Kepadatan dan distribusi tenaga Teknik Biomedika;

	(48) Kepadatan dan distribusi tenaga Keterampilan Fisik Tenaga Kesehatan Tradisional; (49) Kepadatan dan distribusi tenaga Asisten tenaga kesehatan (50) kesehatan
--	--

- Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Ikhtiar yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi adalah melalui berbagai program dan kegiatan yang diukur dengan indikator antara lain: Pelayanan Antenatal (ANC) K1 s/d K4, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Pelayanan Kesehatan Neonatus, Deteksi Dini Faktor Risiko dan Komplikasi, Penanganan Komplikasi Kebidanan, Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi, Pelayanan Kesehatan Bayi, Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan kualitas KB.

Berdasarkan SDKI 2012 angka kematian ibu di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu di NTB tahun 2012 sebesar 251 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di NTB berada pada posisi dibawah angka nasional. Data angka kematian ibu (AKI) menurut SDKI untuk NTB belum tersedia, namun demikian progress pembangunan Kesehatan yang mempengaruhi AKI dapat dilihat pada jumlah kasus dan proporsi kasus kematian ibu di NTB dari tahun 2018 sampai 2019 masing-masing 99 kasus (90,49 per 100.000 KH) dan 97 kasus (93,92 per 100.000 KH). Data AKI tersebut menunjukkan jumlah kasus agak sedikit menurun namun proporsi kematian ibu cenderung meningkat. Upaya untuk menekan kasus kematian ibu yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemprov NTB antara lain: program penundaan usia

perkawinan, Pendidikan kespro di sekolah, pemberian tambah darah bagi remaja di sekolah, penguatan SDM Puskesmas dan posyandu, revitalisasi UKS, pemberian PMT, revitalisasi Posyandu, penguatan kelembagaan pokjanal posyandu, program konseling pra nikah, program keluarga harapan.

- Pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan medis lainnya) di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan oleh selain tenaga kesehatan terlatih menjadi rendah. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih dari target 100 persen di tahun 2020, realisasinya belum diperoleh karena data belum tersedia. Jika melihat capaian indicator ini dari tahun 2015 sampai 2019 berturut-turut adalah 95,85; 94,44; 95,68; 100 dan 96,99 persen, maka terlihat bahwa capaian indicator mengalami fluktuasi, dan selalu berada diatas 94 persen. Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa capaian indicator tahun 2020 diatas 94 persen.
- Indikator persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan menetapkan targetnya di tahun 2020 sebesar 92 persen, namun data capaiannya belum tersedia. Berdasarkan data BPS, capaian indicator tersebut diatas pada tahun 2018-2019 berturut-turut 90 persen dan 93,16 persen, bahkan tahun 2019 capaian telah melampaui dari target yang ditetapkan (92 persen). Capaian tahun 2020, optimis akan mencapai diatas 90 persen.
- Informasi kematian anak yang terdiri dari angka kematian neonatal (AKN), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKBA) merupakan indicator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan termasuk derajat kesehatan suatu negara serta kualitas hidup. Sampai

dengan laporan ini disusun, data terkait angka kematian balita (AKBa) per 1000 KH, angka kematian neonatal (AKN) per 1000KH, dan angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH tahun 2020 belum tersedia. Dimensi kesehatan dalam pengukuran IPM yang digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup, di tahun 2020 Provinsi NTB mencapai 66,51 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,23 tahun dibandingkan tahun 2019. UHH didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dalam satuan tahun. Sebagai representasi dari umur panjang dan hidup sehat, UHH Provinsi NTB di tahun 2020 telah mencapai 66,51 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang lahir di Provinsi NTB pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 66,51 tahun atau sekitar 66 tahun 6 bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, UHH Provinsi NTB bertambah 2,69 tahun. Dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, terjadi peningkatan UHH sebesar 0,23 tahun. Artinya umur harapan hidup penduduk NTB pada tahun 2020 meningkat sebanyak 3 bulan dibandingkan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan UHH Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 71,47 tahun, maka UHH NTB masih ketinggal 4,96 tahun. Meskipun UHH NTB tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019, namun masih jauh tertinggal dengan UHH Indonesia tahun 2020. Kebijakan pembangunan bidang Kesehatan harus lebih focus dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Revitalisasi Posyandu, Program Generasi Emas NTB, Program Jamban Keluarga menjadi program yang sangat tepat untuk lebih menurunkan angka kematian neonatal, kematian bayi dan balita dan lebih meningkatkan usia harapan hidup.

- Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas: a. Imunisasi

rutin; b. Imunisasi tambahan; dan c. Imunisasi khusus. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun. Jenis imunisasi dasar terdiri atas: a. Bacillus Calmette Guerin (BCG); b. Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B- Hemophilus Influenza typeB (DPT-HB-Hib) c. Hepatitis B pada bayi baru lahir; d. Polio; dan e. Campak. Indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2020 mencapai 80 persen, angka ini telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020 yaitu 79,60 persen. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan Kesehatan.

- Data Dinas Kesehatan Provinsi NTB menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2019 mencapai 100% dan tahun 2020 capaian 80% terjadi penurunan sebesar 20% kabupaten/kota yang imunisasi dasar lengkap pada bayi. Sehingga perlu di evaluasi kembali penyebab terjadinya penurunan ini.
- Pada tahun 2020, mengakhiri epidemi AIDS turun 2 kasus , tuberkulosis turun 66 kasus , malaria tahun 2020 turun 1 persen, dan penyakit tropis yang terabaikan (kusta) turun 208 kasus , dan memerangi hepatitis tidak mengalami perubahan , penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Secara umum jumlah kasus menurun.
- Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin meningkat sebesar 16,48 persen pada tahun 2020 hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran PUS untuk mengatur jarak kelahiran.
- Untuk mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan melalui indikator

Prevalensi tekanan darah tinggi ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 24,78% dan terealisasi sebesar 39,30%.

- Tren faktor risiko penyakit tidak menular seperti persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun, prevalensi tekanan darah tinggi, dan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun serta belum dapat memenuhi target RPJMN 2020.
- Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan, tren konsumsi alkohol oleh penduduk sangat fluktuatif dan cenderung meningkat. Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi meningkat sebanyak 3 orang pada tahun 2020 dengan capaian 108 orang.
- Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas tahun 2019 sebanyak 231 orang dan tahun 2020 sebanyak 526 orang. Terjadi peningkatan sebesar 295 orang.
- Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin bertambah sebesar 16,48% pada tahun 2020.
- Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang samadan dinyatakan dalam persentase meningkat sebesar 6,59 persen.
- Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2020 menurun 1,34 persen.
- Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas pada tahun 2020 menurun 0,59 persen.
- Mencapai Cakupan Kesehatan Universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan

akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang rata-rata tercapai. Sedangkan distribusi tenaga medis, kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga gizi belum tercukupi pada tahun 2020.



Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

“Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua”

Dalam rangka menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, terdapat target- target yang harus dipenuhi diantaranya:

TARGET	DESKRIPSI
Target 4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi anak dan remaja yang mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 4. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 5. APK SD/MI/ sederajat 6. APK SMP/MTs/ sederajat 7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat 8. Rata-rata lama sekolah 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
Target 4.2	<ol style="list-style-type: none"> 10. APK PAUD
Target 4.3	<ol style="list-style-type: none"> 11. APK SMA/SMK/MA/ sederajat 12. APK PT
Target 4.4	<ol style="list-style-type: none"> 13. Proporsi remaja dan dewasa dengan kemampuan TIK
Target 4.5	<ol style="list-style-type: none"> 14. Rasio APM Perempuan/laki-laki di setiap jenjang Pendidikan

Target 4.6	15. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun 16. Persentase angka melek aksara penduduk 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
Target 4.7	17. Pengarusutamaan pendidikan kewarganegaraan dan pembangunan berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan
Target 4.A	18. Proporsi sekolah dengan akses terhadap listrik, internet, komputer, in- frastruktur bagi kaum disabilitas, air minum, sanitasi layak, dan fasilitas cuci tangan
Target 4.B	19. Jumlah bantuan pemri kepada mahasiswa asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang
Target 4.C	20. Persentase guru yang bersertifikat pendidik

Pembahasan tujuan 4 akan mencakup 4 isu utama, yaitu: (1) Pemenuhan akses pendidikan; (2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) Pendidikan vokasi dan keterampilan untuk peningkatan keberkerjaan serta (4) Penguatan pendidikan 1 tahun pra-sekolah.

Pendidikan merupakan suatu cara dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang di dalam Preamble Undang Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan pendidikan merupakan faktor utama dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan keahlian yang berdaya saing, serta memiliki karakter dan budi pekerti yang unggul. Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing pendidikan. Pemenuhan layanan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Peningkatan

layanan pendidikan berkualitas pada akhirnya akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian, karakter yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh. Berikut capaian indicator SDGs NTB:

- Pengukuran berdasarkan PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan *Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)*, menunjukkan bahwa proporsi siswa yang dapat mencapai kompetensi minimal untuk matematika dan membaca sudah cukup tinggi .
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB meningkat pada tahun 2020 sebesar 11,91 persen dari tahun 2019 dengan capaian sebesar 80,15 persen.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menurun pada tahun 2020 sebesar 0,26 persen di dibandingkan pada tahun 2019 dengan capaian 80,15 persen
- Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat sampai dengan SMA/SMK/MA/Sederajat mengalami peningkatan pada tahun 2020, kecuali Perguruan tinggi tidak tercapai pada tahun 2020. Ketercapaian cakupan pendidikan juga didorong oleh keberhasilan NTB dalam memberikan layanan pendidikan yang setara antara perempuan dan laki- laki yang dtunjukkan nilai Rasio APM perempuan dan laki-laki semakin mendekati 1 (satu) seperti halnya pada tahun 2019
- Pemerintah NTB terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Upaya yang dilakukan pemerintah cukup membuahkan hasil yang baik dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Hal ini dicerminkan oleh peningkatan kinerja berbagai indikator SDGs yang dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran dan pengajaran berkualitas. Hal ini mencakup antara lain pemenuhan sekolah memiliki akses listrik, internet untuk tujuan pembelajaran, komputer untuk tujuan pembelajaran, sanitasi layak sesuai gender, air minum layak, dan alat cuci tangan layak.

- Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, NTB mengalami kemajuan jika dilihat dari persentase guru yang sudah berkualifikasi S1/DIV. Persentase guru berkualifikasi di jenjang TK/TKLB mengalami kenaikan 2,98 persen, dari 79,28 persen di tahun 2019 menjadi 82,26% di tahun 2020. Kenaikan juga terjadi di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.



Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan bukan hanya merupakan Tujuan 5 SDGs, tetapi terkait dengan hampir seluruh tujuan SDGs dengan masing-masing target spesifiknya. Adapun target yang akan dilaporkan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

TARGET	DESKRIPSI
target 5.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi kaum perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan 2. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 3. Proporsi kaum perempuan mengalami kekerasan oleh orang lain selain pasangan 4. Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
target 5.3	<ol style="list-style-type: none"> 5. Proporsi perempuan yang kawin sebelum usia 15 tahun dan sebelum 18 tahun 6. Median usia kawin pertama 7. Angka kelahiran remaja (ASFR) 8. APK SMA/SMK/MA/ sederajat
target 5.4	<ol style="list-style-type: none"> 9. Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga
target 5.5	<ol style="list-style-type: none"> 10. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen 11. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
target 5.6	<ol style="list-style-type: none"> 12. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi

	13. Unmet need KB 14. Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang kontrasepsi modern 15. UU atau PP yang menjamin akses terhadap layanan kesehatan reproduksi
target 5.A	17. Proporsi (i) penduduk dan (ii) perempuan yang memiliki lahan pertanian 18. Proporsi negara dengan kerangka hukum yang menjamin persamaan hak untuk kepemilikan tanah
target 5.B	19. Proporsi individu yang menguasai telepon genggam
target 5.C	20. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

- Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.
- Upaya pencegahan perkawinan anak belum mencapai target. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun mencapai 16,09 persen (2019) sedangkan di Indonesia 10,82 persen. Ini berarti bahwa 1 (satu) dari 6 perempuan yang berusia 20 sampai 24 tahun, menikah sebelum berusia 18 tahun. Data tahun 2020 tidak ada data.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat tahun 2020 meningkat 3,03 persen dengan capaian 102,21 dibandingkan tahun 2019.
- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional masih belum memenuhi target 30%, meskipun menunjukkan tren yang meningkat dari Pemilu periode sebelumnya.

- Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 4,67 persen dengan capaian 12,73 dibandingkan tahun 2019.
- Di NTB, kebebasan akses pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi telah dijamin dalam Undang-undang No. 36/2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi.
- Target teknologi untuk pemberdayaan perempuan yang diukur melalui proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun proporsi perempuan yang memiliki telepon genggam lebih kecil daripada laki-laki.

6
 AIR BERSIH DAN
 SANITASI LAYAK

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

“Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua”

Pembahasan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak difokuskan pada isu air minum serta sanitasi layak dan aman. Namun demikian, indikator yang dipantau dalam laporan ini juga meliputi indikator di dalam target Tujuan 6 yaitu: (1) Mencapai akses universal terhadap layanan air minum yang aman dan terjangkau; (2) Mencapai akses universal terhadap sanitasi dan kebersihan, serta menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka; (3) Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi dan mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah; (4) Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor; (5) Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan; serta (6) Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air. Adapun status capaiannya tujuan 6 SDGs NTB adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2019, sebanyak 73,61 persen rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (Susenas BPS, 2019). Sementara itu, untuk kategori akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sebesar 73,61 persen. Perhitungan akses air minum aman dilakukan menggunakan estimasi perhitungan akses nasional sehingga didapatkan angka capaian akses aman sebesar 6,7 persen (Kualitas biologi Survei Kualitas Air/SKA 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kualitas fisik air minum berdasarkan Susenas BPS 2018)
- Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 31,62%. Tetapi secara target masih lebih tinggi. Akses terhadap layanan sanitasi layak (termasuk sanitasi aman) mengalami peningkatan dari 73,7 persen pada tahun 2018 menjadi 73,82 persen di tahun 2019, namun belum mencapai target sebesar 90 persen.
- Adapun untuk jumlah desa/kelurahan yang masih melaksanakan praktik-praktik *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah sebanyak 1137 desa/ kelurahan.
- kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal tercapai sesuai target yaitu 10 kabupaten/kota.
- Penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di antaranya penyusunan 1 Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST).
- Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutang bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS tahun 2019 sebesar 3.772,5 ha dan tahun 2020
- Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi menurun dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 3100 ha tidak tercapai dan tahun 2020.



Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

“Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua”

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang strategis dan masih tetap menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Selain itu sektor energi dan sumber daya mineral juga memiliki peranan penting, yaitu sebagai penjamin sumber pasokan energi yang bersih dan juga terjangkau, pendorong aktifitas ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam energi dan mineral.

Untuk memastikan terwujudnya energi bersih dan terjangkau, perlu dipastikan pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan:

TARGET	DESKRIPSI
Target 7.1	1. Rasio Elektrifikasi; 2. Konsumsi Listrik Perkapita; 3. Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga.

- Rasio elektrifikasi tahun 2019 sebesar 97,37% dan tahun 2020 tidak diperoleh data karena data dirilis awal tahun 2021 (sumber Data PT.PLN Wilayah NTB)
- Konsumsi listrik per kapita juga tidak bias diperoleh datanya karena data dirilis pada bulan Februari 2021 (sumber Data PT.PLN Wilayah NTB).
- Sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik per kapita, rasio elektrifikasi juga menunjukkan peningkatan. rasio elektrifikasi

kabupaten/kota se-NTB di atas 60% pada Tahun 2018. Rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan, yaitu Tahun 2019 sebesar 97.37% dari keadaan sebelumnya Tahun 2018 sebesar 87.78%. Sementara itu, konsumsi listrik per kapita yang ditargetkan sebesar 527.67 kwh/kapita (2018) teralisasi sebesar 579.05 kwh/perkapita.

- Sedangkan rasio penggunaan gas rumah tangga menurut data BPS sebesar 51,3% tahun 2018 dan realisasi sebesar 59,42%.



Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua”

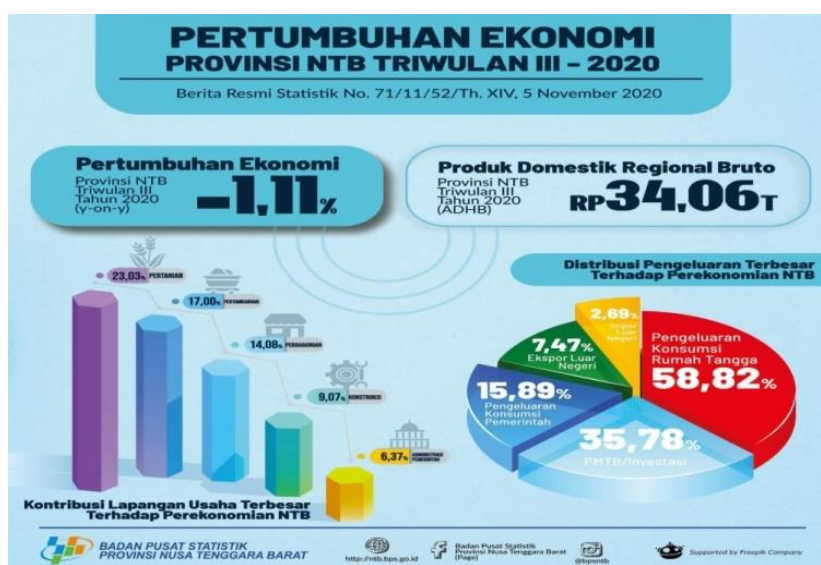
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas merupakan sarana untuk mendorong Indonesia lebih mandiri dan sejahtera. Kondisi ini perlu disertai dengan tersedianya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak sehingga tercapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai langkah strategis telah diupayakan untuk memastikan peningkatan nilai tambah berbagai sektor, akselerasi penyerapan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, kondisi kerja layak, perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta akses terhadap layanan keuangan.

Untuk memastikan hal tersebut tercapai, perlu dipastikan pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan :

TARGET	DESKRIPSI
Target 8.1	1. Laju Pertumbuhan PDB perkapita; 2. PDB Perkapita.

Target 8.2	3. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
Target 8.3	4. Proporsi lapangan kerja informal di sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin; 5. Persentase tenaga kerja formal; 6. Persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian.
Target 8.5	7. Upah rata-rata per jam pekerja 8. Tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; 9. Persentase setengah pengangguran.
Target 8.6	10. Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
Target 8.9	11. Jumlah wisatawan mancanegara; 12. Jumlah devisa sektor pariwisata.

- Perekonomian Provinsi NTB yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2020 mencapai Rp 34,06 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 23,77 triliun. Ekonomi Provinsi NTB triwulan III-2020 dibandingkan triwulan III-2019 mengalami kontraksi 1,11 persen (*y on y*). Dari sisi Produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Pertambangan dan Pengalihan sebesar 40,32 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Luar Negeri yang melayani Rumah Tangga sebesar 44,63 persen.



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB Maret 2020

- Pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 2,69 juta orang, naik sekitar 81,77 ribu orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,98 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 naik sebesar 0,94 persen poin menjadi 4,22 persen dibandingkan dengan Agustus 2019. Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan SMA Kejuruan, yaitu sebesar 9,71 persen
- Sedangkan di provinsi NTB Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian 58,67 persen target tahun 2019 dan realisasi sebesar 59,99 persen berdasarkan jenis kelamin, Persentase tenaga kerja formal target teralisasi 28,99 persen dan tenaga kerja informal sector pertanian terealisasi 96,18 persen.
- Target pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya dicapai melalui indikator Upah rata-rata per jam pekerja target Rp 10.900 dan realisasi Rp.11.787 pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020
- Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur target 3,28 persen dan realisasi 3,42 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen pada tahun 2020.
- Persentase setengah pengangguran target 17,19 persen dan realisasi sebesar 14,16 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2020.

- Untuk mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan dicapai dengan Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) target 18 persen dan realisasi 25,95 persen pada tahun 2019 dan tahun 2020 belum diperoleh data.
- Sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong perekonomian Indonesia, mengalami kemajuan yang baik. Menurut Laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Report* yang dirilis WEF (*World Economic Forum*). Di NTB dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1.550.791 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 2.155.561 orang pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 belum ada data.



Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

“Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi”

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas nasional, pertumbuhan dan perluasan industri untuk mendukung pertumbuhan sektor padat tenaga kerja, dan pengembangan inovasi dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, maka perlu dipastikan pencapaian target dan indikator:

TARGET	DESKRIPSI
Target 9.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan mantap provinsi; 2. jumlah dermaga penyeberangan; 3. jumlah pelabuhan strategis.

Target 9.2	4. Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan per kapita; 5. laju pertumbuhan PDB industri manufaktur;
Target 9.3	6. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; 7. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
Target 9.4	8. Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur;
Target 9.5	9. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. 10. Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.
Target 9.C	11. proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam; 12. proporsi individu yang menggunakan internet.

Kebijakan untuk mendukung pencapaian Tujuan 9 diarahkan untuk membangun infrastruktur ekonomi, meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi riil dan industrialisasi, memanfaatkan infrastruktur TIK, melaksanakan pembangunan rendah karbon dan meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Adapun status Capaian pada tujuan 9 SDGs NTB sebagai berikut:

- Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan focus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua ditunjang dengan peningkatan jalan mantap provinsi, jumlah dermaga penyebrangan sebanyak 8 dan jumlah pelabuhan strategis sebanyak 14 pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih sebanyak 8 tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya tetapi untuk pelabuhan strategis berkurang sebanyak 6 pelabuhan.

- Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita tahun 2019 senilai 4,1% tidak mencapai target sebesar 4,4 persen sedangkan tahun 2020 tidak ada data.
- Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi tercermin dari proporsi individu yang menggunakan telepon genggam sebesar 57,1 persen dan proporsi individu yang menggunakan internet sebesar 39,16 persen pada tahun 2019 angka capaian ini telah memenuhi target pada tahun 2019 yang artinya masyarakat NTB secara umum sudah melek teknologi. Sedangkan pada tahun 2020 tidak diperoleh data.



Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

"Mengurangi Kesenjangan Intra dan AntarNegara"

Penurunan kesenjangan menjadi salah satu fokus pembangunan pada RPJMN 2015 - 2019, untuk memastikan pembangunan dapat dinikmati oleh semua, khususnya kelompok rentan. Pemerataan pembangunan perlu terus diupayakan agar terjadi inklusi sosial, ekonomi dan politik, serta kesempatan yang sama untuk semua. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, perlu dipastikan pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan:

TARGET	DESKRIPSI
Target 10.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. rasio gini; 2. angka kemiskinan; 3. jumlah daerah tertinggal; 4. jumlah desa mandiri; 5. jumlah desa tertinggal; 6. rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal; 7. persentase penduduk miskin di daerah tertinggal;
Target 10.2	<ol style="list-style-type: none"> 8. proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.

Target 10.3	9. indeks kebebasan sipil; 10.jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.
Target 10.4	11.Jumlah peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
Target 10.7	12.jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antar negara RI dengan negara tujuan penempatan, dan;

Pembangunan yang inklusif telah diupayakan dengan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, serta menurunkan kesenjangan antarwilayah, melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

- Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,374. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2019 yang sebesar 0,379. Sementara itu jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,391, *Gini Ratio* September 2019 turun sebesar 0,017 poin. Tahun 2020 Gini Ratio sebesar 0,376 meningkat 0,002 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
- penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dari target 13,75 dan realisasi 14,56 persen pada tahun 2019.

- Kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakann dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut kesenjangan di NTB lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kesenjangan secara nasional. untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan kerja dan perluasan akses terhadap sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
- Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat, terkait legislasi dan kebijakan dicapai dengan cara Indeks Kebebasan Sipil yang pada tahun 2019 dan teralisasi 78,36 persen tidak tercapai hal ini menunjukkan masih terdapat praktek-praktek diskriminatif di masyarakat NTB.
- Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan capaian tahun 2019 sebesar 9 persen dari rencana sebesar 12 persen dan meningkat 14 persen pada tahun 2020 dengan capaian 23 persen dari rencana target 14 persen.



Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

“Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tanaauh dan Berkelanjutan”

Pembahasan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan dalam laporan ini difokuskan pada akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau; sistem transportasi; kebencanaan; dan sampah perkotaan; yang diukur melalui indikator: (1) Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; (2) Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi terhadap PDB global yang

disebabkan oleh bencana dan (3) Persentase sampah perkotaan yang tertangani; (3) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) NTB. Capaian SDGs tahun 2020 NTB sebagai berikut :

- Presentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau baru mencapai 100 persen pada tahun 2019 yang dihitung berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian, yaitu Luas Lantai Per Kapita, Air Minum Layak. Sanitasi Layak. Jenis Atap Terluas, Jenis Lantai Terluas, Jenis Dinding Terluas, Sumber penerangan Listrik.
- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Pada tahun 2020 tidak terdapat orang yang berdampak bencana.
- Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB (IRBI). Tahun 2019 capaiannya 130,84 persen sedangkan pada tahun 2020 tidak ada data.
- Untuk mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan diantaranya dengan menargetkan kota tangguh bencana dari target 4 desa/kelurahan pada tahun 2019 teralisasi 8 desa/kelurahan. sedangkan tahun 2020 tidak terealisasi.
- Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan tahun 2020 Sudah tercapai 1 dari target 2 EWS meskipun begitu ada peningkatan dari tahun 2019 belum teralisasi.
- Indikator untuk mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, sampah perkotaan yang tertangani sebesar 20,06 persen (KLHK, 2019). Sisa dari sampah tersebut tidak tertangani dan dibuang langsung ke lingkungan sehingga sangat berpotensi menimbulkan pencemaran. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota terealisasi 2 pada tahun 2019.



Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

“Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan”

Pembahasan Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab difokuskan pada (1) pelaksanaan *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* (10 YFP SCP) di NTB; (2) Pengelolaan SDM secara efisien, serta (3) Mengurangi limbah pangan perkapita global; (4) Pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan; (5) mengurangi produk limbah; (6) Mendorong Perusahaan besar untuk mempraktekkan informasi berkelanjutan dalam siklus pelaporan dan (7) memperkuat kapasitas ketahanan bencana dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam disemua Negara.. Adapun capaian SDGs NTB sebagai berikut.

- Perusahaan yang menerima Proper Biru di NTB Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 13 perusahaan, naik menjadi 14 perusahaan pada Tahun 2019 (Dinas LHK Provinsi NTB : Laporan Tahunan Proper). Sedangkan realisasi belum terdata.
- Penerapan SNI ISO 14001 bagi perusahaan di Indonesia terus mengalami peningkatan. SNI ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. lingkungan. Selama kurun waktu 2009-2018 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 794 perusahaan (2009) menjadi 1.944 perusahaan (2018).
- Produk ramah lingkungan yang teregister mengalami peningkatan, Pengelolaan sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan hingga Tahun 2018 telah dilakukan pengelolaan sampah terpadu *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R). Jumlah limbah B3 yang terkelola di Provinsi NTB pada Tahun 2018

dari target tahun 2018 sebanyak 1.349 Ton, naik menjadi 1.484 Ton pada Tahun 2019 (Dinas LHK Provinsi NTB). Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang dari target 10% terealisasi 16% pada tahun 2018 dan tahun 2019 ditargetkan 14 terealisasi 25%.



Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

“Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya”

Pembahasan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim difokuskan pada isu ketahanan bencana alam serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang mencakup indikator SDGs seperti: (1) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah; (2) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana. Adapun capaian SDGs NTB sebagai berikut.

- Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) di NTB tahun 2019 dari target 1 dokumen tercapai 2 dokumen sedangkan tahun 2020 tidak ada capaiannya.
- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Ditargetkan 2 pada tahun 2020 tetapi tidak ada capai pada tahun ini.



Tujuan 14. Ekosistem Lautan

“Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan”

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat berkepentingan untuk mencapai target Tujuan 14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya Tujuan 14 diarahkan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem lautan secara berkelanjutan diantaranya melalui: (1) Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut; (2) Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan dan (3) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*); Capaian SDGs NTB sebagai berikut :

- Jumlah luas kawasan konservasi perairan. Pada tahun 2019 263.189,60 Ha sedangkan Tahun 2020 tidak ada data.
- melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization melalui kepatuhan pelaku usaha dan ditergetkan sebesar 35,29% pada tahun 2018 terealisasi sebesar 52,94%. Pada tahun 2019 ditergetkan sebesar 41,18% dan terealisasi 64,86%. Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2019 mencapai 99 persen dan tahun 2020 mencapai.
- Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar melalui jumlah nelayan yang terlindungi yang ditargetkan sebesar 47.435 orang pada tahun 2018 dan terealisasi sebesar 51.250 orang dan tahun 2019 ditergetkan 51.853 orang dan saat ini masih berproses. Jumlah nelayan yang terlindungi tahun 2019 dan tahun 2020 belum diperoleh data.



Tujuan 15. Ekosistem Daratan

“Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati”

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 15 yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam pelaksanaannya Tujuan 15 di arahkan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem daratan secara berkelanjutan diantaranya: (1) Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; (2) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan; dan (3) Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis. Adapun Capaian SDGs NTB sebagai berikut :

- Perubahan tutupan hutan dapat menyebabkan laju deforestasi semakin meningkat. Perubahan ini dipicu oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Sampai tahun 2019 proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan mencapai 49,91 persen. Dan pada tahun 2020 sebesar .

- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terbagi dalam tiga kategori yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Selama tahun 2019 telah tercapai sebanyak 16 KPH dari target yang direncanakan sebesar 15 KPH, sedangkan pada tahun 2020 belum ada data.
- Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2019 tercapai 0,34 persen dan tahun 2020 tercapai..



Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

“Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan”

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) untuk Tujuan 16 pada dasarnya merupakan sebuah sudut pandang dalam membangun perdamaian, menciptakan keadilan yang merata untuk seluruh pihak, serta mengembangkan kelembagaan yang tangguh. Hal tersebut merupakan sebuah dasar upaya untuk mempercepat kemajuan dari Tujuan TPB/SDGs lainnya serta untuk meningkatkan pencapaian keseluruhan Tujuan dari prinsip utama TPB/SDGs yaitu *“no one left behind”*. Tanpa adanya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh maka akan sulit mencapai Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs, sehingga Tujuan 16 seringkali disebut dengan istilah tujuan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tujuan lainnya dalam TPB/SDGs (*enabler goals*).

Tujuan 16 dapat memberikan sebuah kerangka agar pembangunan menjadi perhatian seluruh sektor dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan dan mengatasi ketimpangan. Setidaknya terdapat lima landasan utama dalam menjalankan Tujuan 16 yaitu (i) penyusunan kebijakan dan tata kelola pemerintahan serta penegakan hukum yang berbasis pada bukti dan data yang bebas dari korupsi dan diskriminasi; pencatatan sipil yang merangkum seluruh peristiwa lahir, mati, migrasi, kawin dan cerai, tanpa diskriminasi; (iii) mekanisme untuk mencegah, mendeteksi serta menangani kekerasan di dalam masyarakat dan khususnya terhadap anak dan kelompok rentan; (iv) pengadilan yang inklusif dan bantuan hukum yang tersedia hingga di tingkat lokal; dan (v) keterbukaan informasi publik yang mudah diakses seluruh pihak. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan ke dalam 9 target dan 30 indikator dalam TPB/SDGs di NTB, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

TARGET	DESKRIPSI
Target 16.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir 2. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk 3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Target 16.2	<ol style="list-style-type: none"> 5. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir 6. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
Target 16.3	<ol style="list-style-type: none"> 7. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi 8. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi 9. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum 10. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

Target 16.5	11. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Target 16.6	12. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; 13. Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 14. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota); 15. Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan; 16. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota); 17. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Target 16.7	18. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 19. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II); 20. Indeks Lembaga Demokrasi; 21. Indeks Kebebasan Sipil; 22. Indeks Hak-Hak Politik.
Target 16.9	23. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur; 24. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
Target 16.10	25. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); 26. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan; 27. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 28. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi; 29. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur

	kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Target 16.B	30. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

Tujuan 16 merupakan salah satu tujuan dalam TPB/SDGs yang cukup menantang dalam hal implementasi dan pengukuran data. Dalam konteks Indonesia, Tujuan 16 terdiri dari 10 target dan 34 indikator, yang terdiri dari 5 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 20 indikator nasional sebagai proksi indikator global, dan 9 indikator nasional sebagai tambahan indikator global, sedangkan 2 target yang terdiri dari satu indikator yang tidak relevan untuk Indonesia serta 2 indikator yang masih perlu dicermati ketersediaan datanya. Adapun capaian SDGs NTB sebagai berikut :

- Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir ada 12 kasus pada tahun 2020 meningkat 3 kasus dibandingkan pada tahun 2020.
- Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan menurun 254 Anak pada tahun 2020 dengan capaian 76 Anak.
- Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi menurun 20 orang pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.
- Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari target tahun 2019 sebanyak 15 persen untuk DPR Pusat tercapai 2 persen dan DPRD tercapai 1 persen sangat jauh dari target sehingga pada indikator ini tidak tercapai, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada capaian karena target 5 tahun sekali baru bisa di lihat perkembangannya.
- Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Pada tahun 2020 tercapai 13,64

persen menurun 1,25 persen dibandingkan capaian pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih lebih dominan pada pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.



Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

“Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan”

Pembahasan Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan difokuskan pada capaian lima (5) isu penting yang mendukung pencapaian ke-16 Tujuan lainnya yakni (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (v) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*) dan upaya merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 10 target dan 21 indikator TPB/SDGs NTB sebagai berikut:

TARGET	DESKRIPSI
Target 17.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya; 2. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; 3. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Target 17.3	4. Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.
Target 17.4	5. Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.
Target 17.6	6. Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK); 7. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Pedesaan; 8. Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> .
Target 17.8	9. Proporsi individu yang menggunakan internet; 10. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomuni- kasi universal dan internet.
Target 17.9	11. Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.
Target 17.11	12. Pertumbuhan ekspor produk non migas.
Target 17.17	13. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); 14. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Target 17.18	15. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target; 16. Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).
Target 17.19	17. Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. 18. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statis- tics Register); 19. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website; 20. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS); 21. Persentase konsumen yang menggunakan data Badan

	Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.
--	--

- Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB tahun 2019 tercapai 1,01 persen dari rencana target 0,92 persen dan tahun 2020.
- Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Tahun 2019 tercapai 30,78 persen dari rencana target 26,45 persen sedangkan pada tahun 2020.
- Proporsi individu yang menggunakan Internet. Tercapai 28,31 persen dari rencana 25 persen dan tahun 2020.
- Pertumbuhan ekspor produk non migas tercapai 95,34 persen dari rencana target 11 persen dan tahun 2020 tercapai 46,74 persen (data per September 2020) dari target 11 persen.
- Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.tercapai 39,16 persen dari target 36 persen pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 data tidak diperoleh.
- Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Mengalami peningkatan sebesar 10,23 persen pada tahun 2020 yaitu dengan capaian 23,5 persen, dibandingkan pada tahun 2019 capaian sebesar 13,27 persen.

BAB III

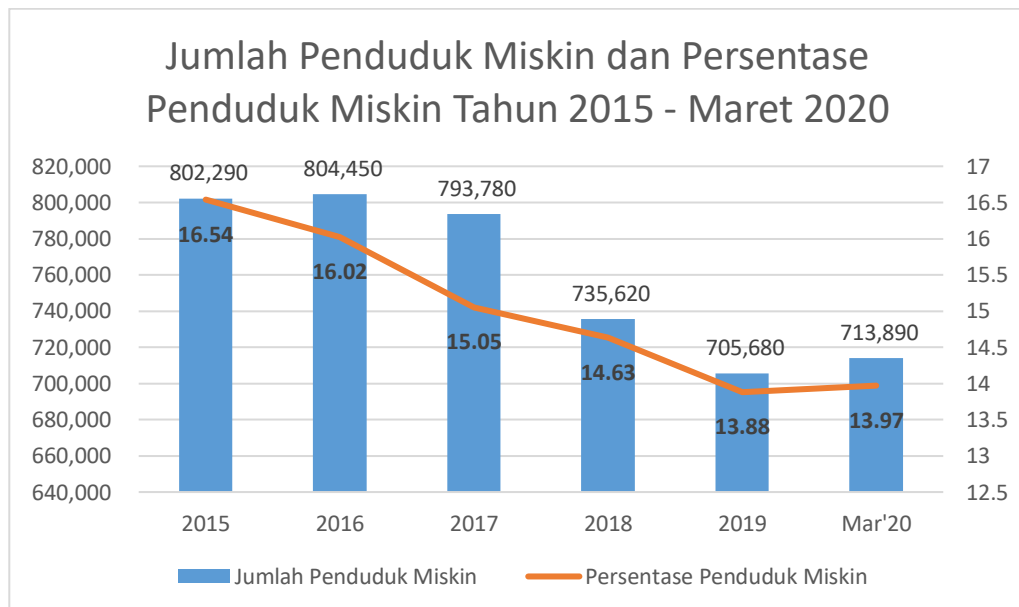
TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)



Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Berikut data perkembangan Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2016 – 2020.



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2020

Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020, penurunan angka kemiskinan Nasional berbanding lurus dengan Penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2015, persentase kemiskinan Provinsi NTB 16,54 dengan jumlah penduduk 802.290 jiwa. Pada tahun 2016, persentase kemiskinan Provinsi NTB sebesar 16,02% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 804.450 ribu jiwa menurun sebesar 0,52% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 menurun menjadi 15.05% dengan jumlah penduduk miskin sebesar

793.780 ribu jiwa. Pada tahun 2018, terjadi penurunan kembali menjadi 14.63% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 735.620 ribu jiwa. Pada tahun 2019 menurun menjadi 13.88% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 705.680 ribu jiwa. Tetapi pada tahun 2020 terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 persen pada angka 13,97 persen dengan jumlah penduduk sebesar 713.890 ribu orang (*BPS, triwulan I 2020*).

2. Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi Provinsi NTB saat ini adalah pandemi covid-19 yang masih cukup tinggi, pemulihan pasca gempa bumi, belum optimalnya koordinasi TKPK provinsi dengan TKPK kabupaten/kota serta belum optimalnya sinergitas program/kegiatan antara Organisasi Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi juga bermanfaat sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Provinsi NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat.

3. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Amanat dari berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas adalah secara garis besar memerintahkan kepada Daerah untuk penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan berbagai program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. Salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah ; Sistem monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk mengetahui output dan outcome dari berbagai upaya program/kegiatan yang sedang dan telah berjalan terkait penanggulangan kemiskinan.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Penguatan kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangna kemiskinan memerlukan upaya antara lain; membangun keterpaduan dan sinergisitas dalam system monitoring dan evaluasi yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara regular dan terpillar, mengembangkan standarisasi indikator, variabel, dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data dan informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan survey dan kunjungan lapangan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagai respon terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskina pada masa pandemic covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah NTB diantaranya adalah :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 324.756 KK. Setiap bulan menghabiskan anggaran sekitar Rp240,5 juta.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako dengan jumlah penerima 209.037 KK. Dengan besaran bantuan kepada setiap penerima Rp200 ribu selama 9 bulan dengan total anggaran Rp916,26 miliar.
3. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperuntukkan bagi 270.005 KK di NTB. Setiap KK memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp486 miar lebih.
4. Program rehabilitasi sosial lansia dengan sasaran 2.530 orang yang tersebar di NTB. Setiap lansia mendapatkan bantuan senilai Rp2,7 juta dengan total anggaran Rp6,8 miliar lebih.
5. Bantuan sosial tunai lansia kepada 1.350 orang selama 3 bulan. Masing-masing lansia mendapatkan Rp600 ribu dengan total anggaran Rp2,4 miliar lebih.
6. JPS Gemilang dalam bentuk bantuan sembako kepada ratusan ribu KK.
7. JPS kabupaten/kota
8. Bantuan Langsing Tunai (BLT) Dana Desa dengan besaran Rp600 ribu per KK selama tiga bulan dan akan ditambah selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK per bulan

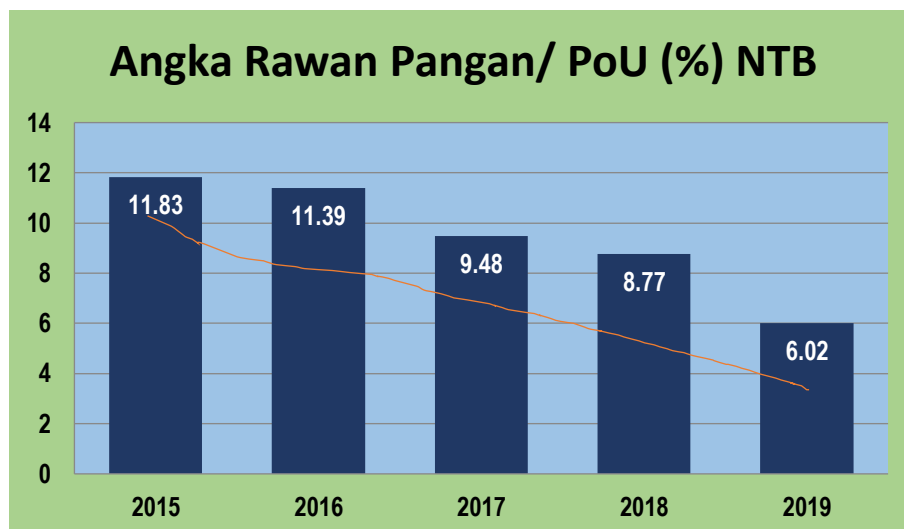


Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan

fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat (Permentan No 43/2010). Berikut grafik angka rawan pangan provinsi NTB :



Sumber : NTB satu data Dinas Ketahanan Pangan

Prosentase penduduk rawan pangan NTB dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari tahun 2015 – 2019 penurunan angka rawan pangan mencapai 5,81 persen dengan angka terendah pada tahun 2019 sebesar 6,02 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketersediaan pangan di NTB semakin terpenuhi. Sementara prevalensi kurang gizi di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama dua tahun terakhir yakni dari tahun 2019 mencapai 13,54 persen dan meningkat 1,61 persen pada tahun 2020 dengan capaian 15,15 persen. Hal yang berbeda terjadi pada Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) juga mengalami peningkatan dari 19,02 persen tahun 2019 menjadi 23,27 persen pada tahun 2020.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Pola konsumsi yang relatif sama pada antar-individu, antar-waktu dan antar-daerah mengakibatkan adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Sehingga, mekanisme mekanisme pasar dan

distribusi pangan antar lokasi dan antar waktu dengan mengandalkan stok akan berpengaruh pada kesetimbangan antara ketersediaan dan konsumsi serta pada harga yang terjadi di pasar. Faktor harga sangat terkait dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan. Sehingga, meskipun komoditas pangan tersedia di pasar namun jika harganya tinggi sementara daya beli rumah tangga rendah akan menyebabkan rumah tangga tidak bisa mengaksesnya. Kondisi ini memicu timbulnya kerawanan pangan.

3. Kebijakan dan Strategi

Strategi dan arah kebijakan provinsi NTB untuk mencapai target adalah meliputi; adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan, serta meningkatkan diversifikasi pangan lokal.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah provinsi NTB terus berupaya melalui program/kegiatan untuk kebijakan pola pangan harapan meliputi peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya lumbung pangan masyarakat, terbina dan tertatanya kelembagaan desa mandiri pangan, memperbanyak kawasan rumah pangan lestari, serta terpantaunya arus keluar masuk komoditas pangan strategis.



Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Target Angka Harapan Hidup (AHH) yang ditetapkan tahun 2019 adalah 65,96 tahun. Capaian AHH pada tahun

2010 dan 2019 masing-masing sebesar 63,82 tahun dan 66,28 tahun, hal ini menunjukkan AHH mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2019. Meskipun capaian AHH sampai dengan semester I tahun 2020 masih *not available* namun melihat capaian AHH yang mengalami trend meningkat dari tahun 2010 sampai 2019, maka target 2020 optimis akan dicapai.

Epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya mulai tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat semakin meningkat. Hal ini juga di dukung dengan sarana prasaran pendukung dan tenaga kesehatan yang semakin membaik di seluruh kabupaten kota di NTB.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2020 masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak semua data bisa di peroleh ditambah lagi dengan adanya pandemic covid-19 yang cukup menguras tenaga, biaya dan perhatian yang cukup tinggi dalam penanganannya.. Meskipun demikian ada beberapa program yang telah mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan seperti program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular; program Obat dan Perbekalan Kesehatan; program Upaya Kesehatan Masyarakat; program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang kesemua program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Selain itu program Standarisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma juga memiliki capaian 100 persen sampai semester I tahun 2019. Secara

keseluruhan predikat kinerja program yang mendukung AHH adalah sedang.

3. Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai target Angka Harapan Hidup didukung dengan 8 (delapan) program yang tersebar di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rumah Sakit HL Manambai, RS Jiwa Mutiara Sukma dan RS Umum Daerah Provinsi NTB.

Pemerintah provinsi NTB telah menginisiasi program Generasi Emas NTB (GEN), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak. Program ini dimulai dari pemantauan ibu hamil yang menjadi sasaran yang dilakukan oleh tenaga terlatih GEN, yaitu Kader GEN dan Pendamping Desa.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Salah satu program unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembnagunan bidang social adalah revitalisasi posyandu.

Terkait dengan pelaksanaan GEN, jajaran Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Kesehatan seNTB melaksanakan kegiatan Aksi Kepedulian yang dikenal dengan program Aksi Mahasiswa untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang merupakan bagian dari program Aksi Seribu Hari atau disingkat ASHAR. Program GEN merupakan program jangka panjang Pemerintah Provinsi NTB, dengan tujuan pada tahun 2025 akan lahir generasi unggul, generasi emas dari NTB.



Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Capaian IPM Provinsi NTB dalam 7 tahun terakhir cukup menggembarakan dan terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 67,30 pada tahun 2018. Selama periode 2010-2018, IPM Provinsi NTB telah bertambah 6,14 poin dengan status capaian IPM sedang. Laju pertumbuhan IPM NTB Tahun 2018 sebesar 1,08 persen. Walaupun laju pertumbuhan pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 1,17 persen, namun pertumbuhannya masih di atas satu persen dan dapat dikatakan tergolong pertumbuhan tinggi. Jika kecepatan pertumbuhan IPM dapat dipertahankan maka bukan tidak mustahil suatu hari nanti akan dapat mencapai IPM level tinggi.

Perkembangan komponen pembentuk IPM tahun 2018: Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat menjadi 65,87 tahun dengan peningkatan sebanyak 0,32 tahun. Artinya setiap bayi yang lahir di tahun 2018 mempunyai harapan untuk hidup hingga berusia 65,87 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,47 tahun dengan penambahan sebanyak 0,01 tahun. Artinya penduduk usia 7 tahun ke atas di NTB memiliki harapan untuk sekolah hingga tingkat 2 perguruan tinggi. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 7,03 tahun dengan penambahan sebanyak 0,13 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di NTB masih setara kelas VII (sekolah menengah pertama).

2. Tantangan dan Pembelajaran

Ada 10 program yang mendukung pencapaian indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sampai dengan semester I tahun 2019 hampir seluruh program belum mencapai target karena masih dalam proses persiapan pengerjaan kegiatan dan sedang proses pembangunan/rehabilitasi gedung. Secara keseluruhan kinerja capaian program yang mendukung indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah berada pada predikat kinerja rendah.

3. Kebijakan dan Strategi

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan selain untuk mendukung pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, juga untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah: cakupan komunitas literasi yang terbina (capaian semester I tahun 2019 sebesar 55,93 persen dari target 100 persen) dan indikator persentase digitalisasi koleksi deposit (capaian semester I tahun 2019 sebesar 21,03 persen dari target 23,91 persen).

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Salah satu program Pemerintah provinsi NTB untuk percepatan pencapaian adalah mengirim putra/putri NTB sekolah ke Luar negeri.



Tujuan 5. Kesetaraan Gender

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan di NTB Tahun 2016 sebanyak 139 kasus, meningkat sangat tajam pada Tahun 2018 sebanyak 301 anak. Proporsi perempuan umur 20-24 Tahun yang bersatus kawin sebelum umur 18 Tahun di NTB menurut data BPS (2015) sebesar 23.17%, walaupun Tahun 2018 turun menjadi 18.86%.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Menurunnya proporsi perkawinan usia anak tersebut tidak meningkatkan median umur kawin pertama perempuan dari 20 Tahun (2016) naik menjadi 19 Tahun (2018). Hal tersebut juga tidak berkorelasi positif dengan APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 91.25% (2016) dari keadaan Tahun 2015 sebesar 89.51%. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 Tahun di NTB masih sangat tinggi yaitu sebesar 75% (2012) dibandingkan dengan nasional sebesar 48% (2012).

3. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah ; perkuatan kelembagaan PUG dan anak melalui keserasian kebijakan pembangunan, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga.



Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Kondisi cakupan akses air minum bersih pada tahun 2018 sebesar 72,56% ; kecenderungan saat ini peningkatan cakupan akan terhambat karena ketersediaan sumber air baku di kabupaten kota tidak merata, kerusakan hutan dikawasan resapan Cekungan Air Tanah (CAT) juga berkontribusi terhadap menurunnya debit air baku. Kondisi air tanah yang diharapkan menjadi alternatif sumber air baku juga terbatas, seperti di kawasan selatan Pulau Lombok mulai dari ujung barat (Sekotong) sampai dengan ujung timur (Jerowaru) merupakan daerah-daerah dengan kondisi air tanah langka. Kejadian gempa di tahun 2018 juga banyak menyebabkan hilangnya sumber – sumber air karena tertimbun longsor maupun pergeseran.

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak sebesar 65.34% (2015) naik menjadi sebesar 69.58% (2016). Sementara itu, data dari Dinas PUPR Provinsi NTB menunjukkan proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sebesar 72.11% (2016) naik menjadi 74.20% (2018). Persentase rumah tangga yang memiliki akses

terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 53.22% (2015) naik menjadi sebesar 58.31% (2016). Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal sudah dibangun di semua kabupaten/kota.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Ketersediaan air baku yang tidak merata dan banyaknya mata air yang hilang maupun tertutup akibat kerusakan tutupan lahan di daerah resapan dan tanah longsor akibat gempa menjadi tantangan dalam penyediaan layanan air bersih/minum. Di banyak lokasi juga didapatkan,

bahwa infrastruktur penyediaan air minum terutama dari jaringan perpipaan banyak yang tidak berfungsi karena sambungan ilegal dari oknum-oknum yang dilewati oleh jaringan pipa dan tidak berfungsinya lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga infrastruktur tidak berfungsi secara berkelanjutan.

Dalam penyediaan layanan air bersih/air minum bagi masyarakat dibutuhkan kerjasama antar daerah dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Kesadaran kolektif kita untuk menjaga kelestarian lingkungan juga wajib untuk ditingkatkan, karena potensi dan ketersediaan sumber air baku ini sangat bergantung pada kelestarian alam. Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah memberikan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di Provinsi NTB .

3. Kebijakan dan Strategi

Cakupan air minum menjadi salah satu indikator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023, Penyelenggaraan SPAM Regional menjadi jalan keluar jangka panjang yang harus diwujudkan untuk mengatasi permasalahan kekeringan yang kita hadapi tiap tahun

di NTB serta Pembentukan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) dan BUMDES yang akan mengelola SPAM yang dibangun di desa.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Kolaborasi dan sinergi antar sektor dalam penyediaan air bersih/minum, karena sumber pendanaan untuk infrastruktur air bersih/minum itu dari berbagai sumber seperti : Pengembangan SPAM dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, Program PAMSIMAS, DAK Air Minum, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBD Desa, program dari CSR Swasta dan BUMN, NGO dan NPO.



Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Sampai Tahun 2018 masih ada sekitar 13,89 persen atau 193.498 KK penduduk NTB belum menikmati layanan listrik. penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 1.199.379 Rumah Tangga atau 86,11 persen dari 1.392.877 Rumah Tangga. Target peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 75,00 persen pada Tahun 2018 direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang bersumber dari dana APBD, APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta yang memiliki usaha di bidang ketenagalistrikan. Dari PLN sendiri dicapai peningkatan RE sebesar 84,55 persen sedangkan dari Non PLN (EBT) dicapai sebesar 1,56 persen, sehingga total realisasi RE sebesar 86,11 persen.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Belum semua masyarakat dapat menikmati sambungan listrik sehingga diupayakan strategi pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat.

3. Kebijakan dan Strategi

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi adalah Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kegiatan: Pengembangan Pemanfaatan Bidang Kelistrikan yaitu: Pemasangan Listrik Murah dan Hemat pada 480 RTS, dilaksanakan di Kab. Lombok Barat 120 RTS, Lombok Utara 120 RTS, Lombok Tengah 120 RTS dan Lombok Timur 120 RTS telah terlaksana 100%; Penerangan Fasilitas Penerangan Jalan Umum Led - TS (Tenaga Surya) sebanyak 9 titik, dengan lokasi Kab. Lombok Barat 3 titik dan Kota Bima 6 titik. Sampai semester I masih dalam proses pengadaan;

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, diikhtiarkan guna terwujudnya peningkatan dan pendayagunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif, dilaksanakan melalui kegiatan: Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan, yang terdiri dari: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan Rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, yang dilaksanakan pada 2 Kabupaten yaitu sebagai berikut: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Dusun Stema Desa Labuhan Aji Kecamatan Badas Kabupaten Sumbawa dengan kapasitas 15 kWp; Rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal Dusun Lebah Suren Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan kapasitas 15 kWp. Pembangunan Digester Biogas 4 m³ sebanyak 389 unit pada 3 kabupaten, dengan rincian berikut: Kab. Lombok Barat 101 unit, Kab. Lombok Tengah 150 unit dan Kab. Lombok Timur 138 unit.

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Berdasarkan pada data BPS Provinsi NTB, diketahui bahwa selama periode tahun 2013 – 2017 jumlah angkatan kerja di NTB terus mengalami peningkatan dari 2.094.608 orang di tahun 2013 menjadi 2.396.169 orang di tahun 2017. Penyerapan tenaga kerja tahun 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 1.559.978 orang (67,34%). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 513.943 orang (22,18%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 242.799 orang (10,48%) mencakup 41.481 orang berpendidikan Diploma dan 201.318 orang berpendidikan Universitas. Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32%. Dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 2,06%.

Kinerja ekonomi Provinsi NTB dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2013 - 2017 mengalami fluktuasi, namun rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir untuk tambang sebesar 7,60 persen, sedangkan untuk non tambang sebesar 6,25 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 adalah sektor pengadaan listrik, gas dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 10,92 persen dan 39,65 persen. Pada tahun 2015 sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan yaitu sebesar 107,03 persen dan pada tahun 2016 dan 2017 sumber pertumbuhan tertinggi adalah berasal dari sektor jasa keuangan dengan masing-masing besarnya pertumbuhan 12,73 persen dan 9,98 persen.

Pembangunan sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrument peningkatan perolehan devisa serta turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrument dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penduduk sekitar destinasi pariwisata.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Dengan terjadinya bencana alam (Gempa Bumi pada akhir bulan Juli dan Agustus 2018) di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, terjadi kerusakan parah objek wisata pada kawasan utara dan tengah yaitu KLU (Pemenang, Senaru, Tiga Gili), Lotim (Pusuk Sembalun dan Sembalun), dan sebagian di Lombok Barat (Senggigi dan Dermaga), Lombok Tengah (Benang Setokel/Kelambu), dan Sumbawa Barat (Pulau Kenawa dan Pulau Kertasari) sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Hasil monitoring bulan Agustus-Oktober 2018, kunjungan wisatawan masih sangat minim baik domestik maupun mancanegara, sehingga perlu diterapkan langkah-langkah pemulihan sarana prasarana pasca bencana pada kawasan pariwisata terdampak.

3. Kebijakan dan Strategi

Sektor pariwisata di Provinsi NTB menjadi program prioritas dengan mengusung branding *Pesona Lombok Sumbawa* sebagai turunan dari program pusat dalam pembangunan pariwisata Indonesia yaitu "*Pesona Indonesia*". Memaksimalkan potensi budaya, alam serta karakter masyarakat yang religius merupakan modal yang kuat untuk pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Gelar Destinasi Pariwisata Halal yang telah disandang Nusa Tenggara Barat, semakin memperkuat arah pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Pembangunan pariwisata dirasakan didaerah terus berkembang yang dirasakan oleh para pelaku dan pemangku kepentingan. Masyarakat

secara perlahan menerima dampak positif pembangunan pariwisata terutama dalam hal kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Strategi pembangunan kepariwisataan di Provinsi NTB dilakukan melalui :Pengembangkan destinasi kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; Pengembangkan industri pariwisata yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; Pengembangkan kelembagaan dan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan tata kelola destinasi yang nyaman dan aman, Pengembangkan promosi dengan menggunakan Tehnologi digital sebagai respon dari tolls pemasaran pariwisata "*Low Budget High Impact*".

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kunjungan wisatawan tahun 2018 dengan melakukan standarisasi fasilitas umum pada destinasi wisata secara bertahap, meningkatkan fasilitas pariwisata, baik kuantitas maupun kualitas, peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi serta mengupayakan konektivitas dari pasar potensial serta didukung dengan peningkatan mutu SDM Pariwisata. Melakukan promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas dan memperbanyak event promosi yang mengangkat potensi Nusa Tenggara Barat dan citra kawasan pariwisata daerah.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan

serta pelestarian lingkungan, Dilaksanakan dengan terpadu secara lintas

sektor, lintas daerah dan lintas pelaku, Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.



Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan yang lebih tinggi. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita sebesar 4.22% (2015), turun menjadi sebesar 4.20% (2016). Perkembangan sentra industri formal NTB dari Tahun 2014-2017 sebesar 2,59 persen, sedangkan untuk industri non-formal memiliki perkembangan sebesar 2,19 persen. Pada tahun 2017, jumlah perusahaan yang masuk ke dalam industri formal sebanyak 8,730 unit dan untuk industri non-formal sebanyak 72.113 unit. Kondisi jalan mantap Provinsi NTB Tahun 2018 sudah mencapai 83.65%, naik dibandingkan keadaan Tahun 2018 sebesar 77.16%. Jumlah pelabuhan strategis dan dermaga penyeberangan sampai dengan Tahun 2018 sebanyak tujuh pelabuhan/dermaga penyeberangan. Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendorong pengembangan industri.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Dengan terjadinya bencana alam (Gempa Bumi pada akhir bulan Juli dan Agustus 2018) di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, terjadi kerusakan infrastruktur pada kawasan utara dan tengah yaitu KLU (Pemenang, Senaru, Tiga Gili), Lotim (Pusuk Sembalun dan Sembalun), dan sebagian di Lombok Barat (Senggigi dan Dermaga),

Lombok Tengah (Benang Setokel/Kelambu), dan Sumbawa Barat (Pulau Kenawa dan Pulau Kertasari)

Perkembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata belum maksimal seperti yang diharapkan dalam menanggulangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya yang tinggal di lingkaran destinasi.

3. Kebijakan dan Strategi

Untuk mempersiapkan Industrialisasi Permesinan, sudah melakukan: Tenaga Kerja untuk mendukung permesinan sudah dilatih dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli dibidangnya, sebanyak 94 IKM, Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja dibidang permesinan, sebanyak 94 IKM, Memfasilitasi peralatan pengolahan pangan, sebanyak 222 IKM, Program inkubasi bisnis “sekolah wirausaha baru” selama 2 tahun, sebanyak 20 IKM, (sedang proses pembelajaran In 1), Program rintisan produksi mesin dan rintisan karoseri truck, dalam tahap pembelian material pabrikasi .

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua melalui pembangunan jalan provinsi, dermaga penyebrangan dan pelabuhan startegis . Pemerintahan NTB periode 2019-2023 memprioritaskan program industrialisasi untuk lima tahun kedepan.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam mendorong untuk meningkatkan jumlah industri di Provinsi NTB, dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas kelautan dan perikanan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi dan UKM, dimana dinas perindustrian sebagai lokomotif terbentuk dan

berkembangnya di sektor Industri, baik Industri olahan maupun industri permesinan.

Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di NTB dan meningkatkan efisiensi ekonomi.



Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Indeks gini di perdesaan dan perkotaan berfluktuasi dari tahun 2013-2018. Ketimpangan ekonomi atau indeks gini di Provinsi NTB selama periode Maret 2016 – Maret 2017 mengalami peningkatan 0,012 poin. Indeks gini NTB di bulan Maret 2016 sebesar 0,360 poin, sementara di Maret tahun 2017 sebesar 0,371 poin.

2. Tantangan dan Pembelajaran

ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi itu justru terjadi di daerah perkotaan. Faktor yang berpengaruh besar terhadap meningkatnya tingkat ketimpangan ekonomi selama periode September 2016 – Maret 2017 adalah berdasarkan survey sosial ekonomi (Susenas), terjadi penurunan pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah, dibandingkan dengan pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 20 persen teratas.

3. Kebijakan dan Strategi

Kondisi dan permasalahan kemiskinan di setiap wilayah sangat beragam dan spesifik, untuk itu butuh kebijakan dan strategi yg berbeda. Begitu juga kondisi keparahan kemiskinan dari setiap wilayah sangat beragam sehingga ada wilayah yang mendesak segera di tangani dan ada juga wilayah yang masih bisa ditunda penanganannya.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dianalisis oleh TKPKD Provinsi NTB yang meliputi laporan rutin OPD pelaksana kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, pendataan oleh BPS, penelitian dan kajian kemiskinan daerah yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya, pemberitaan media massa, hasil koordinasi dengan TKPKD Kabupaten/Kota se-NTB, dan laporan kelompok masyarakat. Tim TKPKD menyiapkan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Laporan hasil monitoring dan evaluasi juga memuat rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah untuk ditindaklanjuti.



Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2014-2017 untuk Tahun 2018 sampai dengan Semester II (Oktober 2018) sudah mencapai target yaitu sebesar 1599 unit Rumah dari 2509 unit rumah. Untuk Kabupaten Lombok Utara Pembangunan Baru Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak dapat direalisasikan dikarenakan terdampak bencana alam. Sehingga Penanganan rumah korban bencana langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat khususnya untuk rumah kategori rusak berat.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Untuk mempermudah informasi kondisi perumahan di NTB diperlukan sitem informasi manajemen secara online dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Perumahan. Sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 Poin d, Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang baik, transparan, efektif,

dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui kondisi perumahan secara pasti serta proses pengajuan usulan bantuan dapat efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sasaran bantuan tepat sasaran. Penyelenggaraan Sistem Informasi ini perlu didukung oleh semua pihak baik Pemerintah maupun para pelaku pembangunan serta masyarakat, sehingga Sistem Informasi ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

3. Kebijakan dan Strategi

Koordinasi pendataan dengan kabupaten/kota terkait updating data rumah tidak layak huni. Meningkatkan Anggaran Pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Diperlukan pelibatan Kepala Desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD Teknis melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan dan Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (RLH) yang pendanaan bersumber dari APBD Provinsi NTB.



Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Pengelolaan sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Hingga Tahun 2018 telah dilakukan pengelolaan sampah terpadu *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R). Jumlah limbah B3 yang terkelola di Provinsi NTB pada Tahun 2016

sebanyak 769 Ton, naik menjadi 1.226 Ton pada Tahun 2018 (Dinas LHK Provinsi NTB).

2. Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan penerapan prinsip 3R di bank sampah hanya mampu mengelola 6.75% dari total timbunan sampah. Terkait pengurangan limbah, khususnya limbah plastik, pemerintah Provinsi NTB menghimbau kepada semua masyarakat yang dimulai dari jajaran pemerintahan provinsi dengan mengurangi penggunaan limbah kertas dan plastik. Pengelolaan limbah juga dilakukan dengan mengaktifkan kerja bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

3. Kebijakan dan Strategi

pengelolaan sampah berkelanjutan yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya melalui 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) dan ekonomi sirkular.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Rancangan model pengelolaan sampah menuju NTB Zero Waste 2023 yang merupakan salah satu program Unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.



Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Tren peningkatan suhu udara 0,5°C pada tahun 2030, Curah hujan pada musim kemarau diproyeksikan semakin berkurang sekitar 20% dari kondisi saat ini. Peningkatan nilai suhu rata-rata tahunan sebesar 0.9 - 1.1°C di wilayah NTB, Kenaikan suhu udara minimum rata-rata tahun 2001 - 2010 sebesar 0.7°C, tertinggi 1.4°C di tahun 2010. Proyeksi peningkatan nilai suhu minimum tahunan di tahun 2020-2049 sebesar 2.3 - 2.7°C di wilayah NTB .

2. Tantangan dan Pembelajaran

Efek perubahan iklim global yang berdampak terhadap sumber daya air di wilayah NTB : Pola curah hujan mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi secara tepat waktunya, Peningkatan intensitas kejadian bencana banjir, kekeringan, badai dan tanah longsor, Pengurangan jumlah mata air di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 750 buah pada Tahun 1980 menjadi sekitar 300 buah pada Tahun 2006, Meningkatnya percepatan sedimentasi pada sarana dan prasarana sumber daya air seperti embung, waduk dan saluran irigasi.

3. Kebijakan dan Strategi

Pengintegrasian RAD-API dengan RPJMD, RKP Provinsi dan Kabupaten/Kota : Koordinasi oleh BAPPEDA dalam forum secara menyeluruh dan terpadu yang dihadiri unsur pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD API : membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dengan Keputusan Gubernur, yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, membentuk sekretariat RAD-API yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Telah di susun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Provinsi Nusa Tenggara Barat. RAD-API menjadi acuan bagi

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta *pelaku* usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.



Tujuan 14. Ekosistem Lautan

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Ekosistem lautan terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove yang menjadi satu kesatuan dalam system ekologi perairan laut. Mengingat fungsi dan perannya sangat strategis maka beberapa kawasan di perairan laut NTB telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah provinsi NTB dengan luasan pada tahun 2018 mencapai 241.051,13 ha dan mengalami tren penambahan luasan di Tahun 2019 menjadi 263.189,60 ha. Luasan tersebut masih jauh dari total luasan perairan laut NTB seluas 2.915.903,960 ha sehingga penetapan sebagian luasan perairan tersebut tidak menghambat aktivitas kegiatan usaha disebagian besar perairan laut NTB. Hal ini terlihat dari kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan mengalami tren peningkatan yang signifikan seperti di tahun 2018 realisasi kepatuhan pelaku usaha sebesar 52,94% dari target 35,29%. Demikian halnya di Tahun 2019 juga mengalami peningkatan yaitu dari target 41,18% dan terealisasi mencapai 64,86%. Sedangkan terkait dengan indikator jumlah nelayan terlindungi atau terfasilitasi dengan asuransi nelayan juga mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun walaupun disadari tidak sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah provinsi NTB setiap tahunnya, hal ini terlihat dari realisasi Tahun 2018 hanya 32.144 orang nelayan dari 47.435 orang. Sedangkan di Tahun 2019 ditargetkan dapat difasiltasi sebanyak 51.835 orang namun terealisasi hanya 39.316 orang. Salah satu faktor penghambat dari tidak terealisasi target tersebut adalah disebabkan oleh sebagian besar

masyarakat nelayan belum memiliki kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

2. Tantangan dan Pembelajaran

Pengelolaan ekosistem lautan sangat ditentukan sejauhmana komitmen semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam di laut secara optimal, terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan pola pemanfaatan lestari yang senantiasa memperhatikan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi mendatang. Pola pelestarian atau dikenal dengan istilah konservasi pada sebagian perairan laut tentu akan menimbulkan pro dan kontra antar pihak yang berkepentingan. Misalnya bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha merasa dibatasi menggunakan ruang laut. Namun sebaliknya pemerintah berhak melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan laut guna memastikan tidak terjadi over eksploitasi yang melebihi daya dukung dan daya tampungnya. Sehingga pada suatu saat perairan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan dapat menjadi kawasan **Bank Ikan** yang pada akhirnya berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlangsungan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat.

3. Kebijakan dan Strategi

Guna mewujudkan ekosistem lautan yang lestari di Provinsi NTB salah satunya adalah memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan regulasi yang mengatur tata kelola pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan lautan. Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi NTB sudah memiliki peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037 serta Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 sebagai salah satu instrument untuk mengatur

pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut di NTB. Namun guna memastikan aspek ketaatan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya lautan perlu didorong terbitnya peraturan gubernur terkait dengan tata cara pembinaan dan pengawasan yang merupakan salah satu amanat Perda 12 Tahun 2017 tersebut. Adapun strategi yang diharapkan adalah mendorong partisipasi semua pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung untuk secara arif dan bijaksana dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lautan agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Guna mendorong terwujudnya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan 14 ekosistem lautan adalah memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, mendorong terbitnya Pergub tentang kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta memfasilitasi perluasan pelayanan asuransi nelayan dan juga mendorong peningkatan investasi usaha sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan.



Tujuan 15. Ekosistem Daratan

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Jika dibandingkan dengan data IKTL Nasional, data kualitas tutupan lahan NTB lebih baik. Indek tutupan lahan tahun 2018 adalah 61,27* (*nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018*), sedangkan Nilai IKTL NTB tahun 2019 belum tersedia karena masih

tahun berjalan dan dalam proses pengukuran sehingga IKTL NTB tahun 2019 akan diketahui di tahun berikutnya (2020).

2. Tantangan dan Pembelajaran

Masih dijumpai terjadinya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk menekan tindak pidana kehutanan tersebut Dinas LHK melakukan operasi pengamanan hutan juga dilaksanakan di areal hutan seluas 129.250 hektar.

3. Kebijakan dan Strategi

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya lain yang dilakukan adalah melalui kegiatan rehabilitasi daerah tangkapan, dengan membuat bangunan sipil teknis yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2019, direncanakan akan dibangun 80 bangunan sipil teknis di beberapa wilayah KPH NTB.



Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Penurunan jumlah konflik sosial adalah indikator yang dapat mencerminkan situasi dan kondisi keamanan di daerah. Keberhasilan dalam mengatasi terjadinya konflik sosial tidak hanya dari kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitasnya juga dapat diturunkan. Pada tahun

2017 penurunan jumlah konflik sosial melampaui dari target yaitu 21 dari 32 kasus. Sampai dengan semester II tahun 2018 tercatat 7 kasus terjadi konflik di NTB.

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi NTB, indeks reformasi birokrasi Provinsi NTB Tahun 2019 sampai dengan Semester I adalah kategori BB, melampaui target yang ditetapkan yaitu B. Capaian ini juga meningkat dari tahun 2017 dengan kategori CC.

Tercapainya target ini merupakan sasaran dalam mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi diantaranya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan di tingkat desa/kelurahan.

3. Kebijakan dan Strategi

Melakukan mediasi antar warga kampung yang berkonflik maupun yang berpotensi terjadinya konflik terutama di daerah-daerah yang dipetakan rawan konflik. Selanjutnya BPSDM dalam RPJMD Tahun 2019-2023 menetapkan program pendukung utama untuk pencapaian Sasaran Penataan Sistem Manajemen SDM dengan indikator Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya yang dilakukan untuk meredam dan meminimalisir potensi konflik adalah: Mengoptimalkan peran Mitra Kerja Bakesbangpoldagri seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jejaring, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk mendeteksi dan cegah dini setiap potensi konflik yang ada di lapangan, Melakukan koordinasi yang intensif dengan semua Kesbangpol seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mencegah lebih dini potensi konflik maupun untuk mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi.



Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

1. Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

pada tahun 2019 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB sebesar 0,51 atau masuk dalam kategori “Sedang”. Pada tahun 2018, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB mengalami penurunan dari tahun 2017, namun pada tahun 2019 (semester I) menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Realisasi PAD s.d Oktober tahun 2018 meningkat 6,34% dari realisasi PAD s.d Oktober tahun 2017 dan telah mencapai 78,50% dari target PAD tahun 2018. Lebih dirinci, Pertumbuhan pajak daerah s.d Oktober tahun 2018 Adalah sebesar 7,94% atau melampaui Rp.76.871.901.256,- dari realisasi Pajak Daerah diperiode yang sama tahun 2017, sedangkan realisasi komponen Retribusi Daerah s.d Oktober tahun 2018 mengalami Penurunan realisasi hingga -7,29% disebabkan rusaknya beberapa asset retribusi daerah akibat gempa bumi, komponen Lain-lain PAD yang sah dalam s.d Oktober tahun 2018 mengalami pertumbuhan hingga 21,18%.

2. Tantangan dan Pembelajaran

Pada semester II tahun 2018 ini penerimaan PAD mengalami guncangan akibat musibah gempa yang menimpa wilayah NTB pada awal Agustus lalu, dimana sebagian besar asset dan potensi penerimaan

PAD mengalami kerusakan yang mengakibatkan penerimaan PAD tidak dapat optimal seperti yang direncanakan. Sementara hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam s.d Oktober tahun 2018 menurun -37,16% dari periode yang sama tahun 2017 akibat tidak diterimanya kembali deviden dari PT DMB yang sedang dilikuidasi.

3. Kebijakan dan Strategi

Program pendukung untuk mencapai indikator ini yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Melakukan pelatihan juru sita pajak yang akan beroperasi pada awal tahun 2019 guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan menekan angka TMDU, Memanfaatkan layanan call center sebagai layanan On Call yakni menerima permintaan WP potensial untuk didatangi dan dilayani aktifitas pembayaran PKB-nya.

4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan yang dilakukan adalah; Menambah jam layanan yakni Samsat Night Music setiap sabtu malam yang beroperasi didepan kantor Bappenda Provinsi NTB (jalan Majapahit) dengan menghadirkan music dan penyanyi yang menghibur masyarakat/Wajib Pajak serta pemberian Door Price, Memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan OPD yang potensial dalam berkontribusi terhadap peningkatan PAD, Melakukan koordinasi dengan BPKAD, Bank NTB dan Instansi terkait lainnya untuk memantapkan e-sts Online Retribusi.

Pembelajaran TPB/SDGs

1. Tujuan dalam SDGs	: Tanpa Kelaparan
2. Nama Instansi	: Bappeda Kabupaten Bima
3. Nama Program	: Program Stunting
4. Lokasi	: Kabupaten Bima
5. Waktu Kegiatan	: Tahun 2016-2020

Proses Pelaksanaan :



Penandatanganan kesepakatan bersama rembuk stunting

Pelatihan Kader Pembangunan



- Ada 8 aksi Konvergensi yang telah dilaksanakan yaitu
 1. Analisis Situasi, Identifikasi desa lokus
 2. Rencana Kegiatan,
 3. Rembuk Stunting,
 4. Peraturan Bupati tentang Peran Desa,
 5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM),
 6. Sistem Manajemen Data,
 7. Pengukuran dan Publikasi stunting,
 8. Reviu Kinerja Tahunan.

- Sebagai bentuk tindak lanjut langkah pertama yang dilakukan oleh Kabupaten Bima adalah menetapkan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi yang bertugas:



*Pelatihan Kader
Pembangunan Manusia
oleh TPID*

- Menyusun perencanaan dan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- Mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- Pelaksanaan Aksi Integrasi sesuai dengan tahapan dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
- Melakukan rapat koordinasi untuk merencanakan agenda-agenda

Hasil dan Dampak

- Dalam melakukan Aksi #1 Analisis Situasi, telah dilakukan review program berdasarkan cakupan layanan pada desa prioritas dengan melihat ketersediaan data dari 20 Indikator cakupan layanan program. Dari hasil review tersebut ditetapkan 20 desa lokus pada tahun 2020, hasil dari aksi #1 menunjukkan bahwa terdapat 31 desa stunting di Kabupaten Bima, namun ditetapkan 20 desa sebagai lokus setelah merujuk pada irisan 20 indikator dimaksud. Pada tahun 2021, terdapat 30 desa bertatus merah di Kabupaten Bima dan seluruhnya ditetapkan menjadi lokus stunting, 9 desa diantaranya merupakan desa yang

masih berstatus merah pada tahun sebelumnya dan kembali muncul pada analisa situasi tahun 2021, dengan rincian 4 Desa masuk pada desa lokus tahun 2020 dan 5 desa bukan desa lokus 2020. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penanggulangan stunting di Kabupaten Bima mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Intervensi spesifik dilakukan melalui Gerakan Bersama Kabupaten Bima Anti Stunting, Kekurangan Gizi dan Anemia (GEBRAK BIMANTIKA) yang merupakan kolaborasi berbagai Perangkat Daerah dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, dengan program kegiatan yang terdiri dari Program Peduli Stunting, Penguatan Sasaran 1.000 HPK, Sarangge (Balai-Balai) Gizi, Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil dan Program 16.660 Jamban. Intervensi Sensitif dilakukan secara lintas sektor dengan program yang terdiri dari Air Bersih dan Sanitasi (Dinas PKP), BPNT dan PKH (Dinas Sosial), Pola Asuh dan BKB (DP3AP2KB), Pembinaan KPM dan Pokja Posyandu (DPMDes), Pedidikan Anak Usia Dini (Dikbudpora), Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (DKP), Dokumentasi dan Publikasi (Diskominfo).

- b. Dalam melakukan Aksi #2 Rencana Kegiatan, Kabupaten Bima telah melakukan sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan yang mengarah pada penanganan di lokus stunting serta menilai/mengevaluasi perangkat daerah dalam hal kesesuaian program dan kegiatan untuk pencegahan dan penurunan stunting. Perangkat Daerah yang terlibat, baik pada intervensi sensitif maupun intervensi spesifik, mengerjakan 18 Program pada tahun 2019, bertambah menjadi 20 program pada tahun 2020 dengan jumlah anggaran Rp 69 Milyar lebih pada Tahun 2020.
- c. Aksi #3 Rembuk Stunting, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting dilakukan Rembuk Stunting dengan melibatkan semua para pihak (*stakeholder*) termasuk didalamnya Perangkat daerah yang

terlibat, NGO, para camat, kepala desa serta organisasi wanita dan lain sebagainya. Rembuk Stunting ini menghasilkan :

1. Pemerintah Kabupaten Bima beserta Pemerintah Desa, Perusahaan dan NGO berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting;
 2. Penganggaran kegiatan penanganan stunting bersumber dari APBD, APBDes, APBN, CSR, dan Sumber Dana lainnya yang sah;
 3. Menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2018-2021;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu langsung ke lapangan;
 5. Menepakati Komitmen dalam sinergitas kolaborasi rencana program dan kegiatan dalam penurunan stunting di Kabupaten Bima yang akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021;
 6. Melaksanakan amanat Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting dan berkomitmen mensosialisasikannya kepada masyarakat luas;
 7. Menepakati berita acara ini beserta lampirannya berupa notulensi rapat merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara kesepakatan yang telah dibuat; dan
 8. Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah dan desa Tahun 2021.
 9. Advokasi dan sosialisasi program kegiatan penanggulangan stunting juga dilakukan untuk mendukung tercapainya target yang diinginkan.
- d. Aksi #4 Peran Desa, keterlibatan dan kontribusi desa dalam penanganan pencegahan dan penurunan stunting sangat penting hal ini telah digambarkan dalam evaluasi data akhir pemberian anggaran intervensi penanganan stunting baik intervensi spesifik maupun sensitif. Dalam rangka penanganan pencegahan stunting sesuai kewenangan desa, telah disahkan : (1) Peraturan Peraturan Bupati Bima Nomor 39

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020, (2) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting, (3) Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima, (4) Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, yang ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Kepala DPMD Kabupaten Bima pada tahun 2020 untuk pengalokasian dana desa untuk kegiatan penanganan stunting pada desa lokus. Pemerintah desa diwajibkan memprioritaskan pengalokasian anggaran sebesar 30% dari jumlah perolehan Dana Desa (DD) untuk pemenuhan pelayanan dasar termasuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat penanganan stunting. Pemerintah Desa dan KPM melalui APBDes melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Promosi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Kemandirian Keluarga
2. Membentuk dan mengembangkan Rumah Desa Sehat (RDS)
3. Peningkatan pelayanan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil)
4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)
5. Penyediaan sarana dan prasarana PAUD
6. Penyediaan Sumber Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Memfasilitasi distribusi bantuan jaminan sosial dari pemerintah pusat/ provinsi dan kabupaten.

Pada tahun 2019 telah dialokasikan pemanfaatan dana desa sebesar Rp 1,1 Milyar lebih untuk kegiatan PAUD, Posyandu, KB, PKK dan Jambanisasi dan Air Bersih. Pengalokasian dana yang besar dari berbagai sumber pendanaan adalah bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bima terhadap intervensi stunting. Pada tahun 2019,

Kabupaten Bima menduduki peringkat ke 3 (tiga) dalam hal kinerja penanganan stunting tingkat propinsi NTB. Kemudian di tahun 2020, dari hasil penilaian penurunan dan pencegahan stunting di masing masing provinsi di Indonesia, Kabupaten Bima menduduki peringkat pertama dalam hal konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi NTB dimana terdapat di dalamnya inovasi “**GEBRAK BIMANTIKA**” yang menempati Top 45 nasional kategori inovasi pelayanan publik dalam menurunkan angka stunting, selain itu Kabupaten Bima juga mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Direktur Jenderal Bina Bangda atas pencapaian dalam upaya penurunan stunting tahun 2019 – 2020.

Tantangan dan Hambatan

Pencegahan dan penanganan stunting memerlukan kerja sama yang baik, terintegrasi, terarah dan menyeluruh oleh semua pihak. Baik itu instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat itu sendiri. Sebab tanpa keterlibatan dan bantuan dari berbagai pihak sangat tidak mungkin akan tercapai tujuan dari program maupun kegiatan penanganan stunting yang telah dan akan dilakukan. Inovasi dalam konvergensi penanganan stunting adalah inovasi Gebrak Bimantika yang menempati Top 45 nasional kategori inovasi penanganan stunting, selain itu Kabupaten Bima juga mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Direktur Jenderal Bina Bangda atas pencapaian dalam upaya penurunan stunting tahun 2019-2020. Generasi bebas stunting adalah generasi yang akan tumbuh sehat, cerdas dan dapat menjadi tumpuan harapan kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Peluang dan Replikasi

Tim konvergensi Kabupaten Bima akan terus berupaya meningkatkan program, kegiatan dan upaya-upaya penanganan stunting yang telah ada, sejauh ini terlihat pada jenis program dan kegiatan intervensi yang kian bertambah setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Bima juga akan melakukan replikasi penanganan stunting di setiap tingkat, baik itu desa, kecamatan dan kabupaten, lebih khusus pada desa-desa dengan status prevalensi stunting berwarna merah. Inovasi “**GE BRAK BIMANTIKA**” juga membuka jalan bagi kecamatan dan desa untuk belajar mereplikasi/mengembangkan inovasi-inovasi penanganan stunting secara mandiri pada wilayahnya masing-masing

DOKUMENTASI PROGRAM STUNTING KABUPATEN BIMA



Penandatanganan kesepakatan bersama rembuk stunting Kabupaten Bima 2019



Pelatihan Kader Pembangunan Manusia oleh TPID



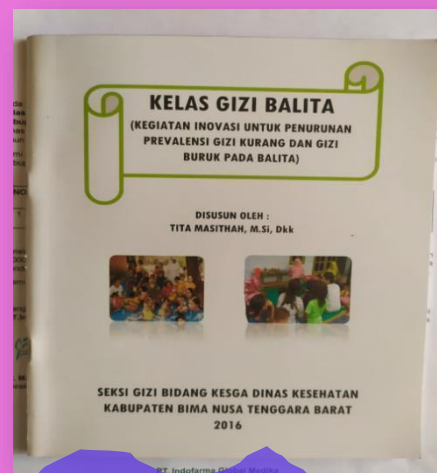
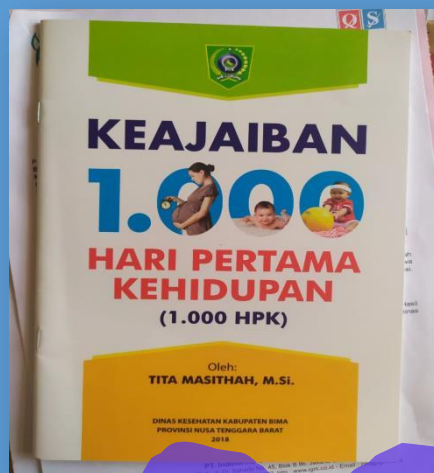
Kunjungan Tim Sekretariat Wakil Presiden bersama World Bank pada Desa Lokus tahun 2020



*Talkshow *Sharing* Praktik Baik Penanganan Stunting Tingkat Nasional Bersama Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2020*



"Expo GE BRAK BIMANTIKA Kecamatan Langgudu"



Buku Terbitan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tahun 2019



Pendataan dan kelas gizi ibu



Pemberian Kapsul Vitamin A di Desa Rada Kecamatan Bolo

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah terkait organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk percepatan pencapaian target –target indikator sesuai Rencana Aksi Daerah 2019-2023. Hal ini penting dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kunci keberhasilan percepatan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB adalah dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan /pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergitas program/kegiatan yang mendukung capaian indikator agar tepat sasaran serta komitmen pimpinan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi NTB Tahun 2019 ini merupakan upaya sistematis dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk percepatan pencapaian target indikator SDGs sesuai dengan perkembangan lingkungan, potensi wilayah, karakteristik, dan sosial budaya masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut serta dapat dijadikan untuk pembelajaran kedepan termasuk diharapkan sebagai acuan juga untuk lahirnya inovasi-inovasi dalam mempercepat capaian target SDGs pada tahun 2023.

Lampiran :
Target / Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB / SDGs)

Lampiran :
Indikator Pilar Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB / SDGs)

